



RANCANGAN AKHIR
RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KUDUS TAHUN 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Sunan Muria No. 9 Kode Pos 59313 Kudus

Telp. (0291) 438713

E-mail : kominfo@kuduskab.go.id

DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Judul	1
Daftar Isi	2
Daftar Tabel	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang.....	4
1.2 Landasan Hukum.....	7
1.3 Maksud dan Tujuan.....	9
1.4 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN	
LALU.....	12
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan	
Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	12
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan	
Informatika.....	23
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan	
Fungsi Perangkat Daerah	26
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	34
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	46
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	50
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika.....	51
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	56
4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2026.....	56
4.1.1 Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap	
rumusan program, kegiatan dan subkegiatan.....	57
4.2 Manajemen Risiko Perangkat Daerah Tahun 2026.....	75
BAB V PENUTUP	91

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024 Kabupaten Kudus..... 15
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus..... 24
Tabel 2.3.1	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024..... 26
Tabel 2.3.2	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Statistik Tahun 2020-2024..... 28
Tabel 2.3.3	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Persandian Tahun 2020-2024..... 29
Tabel 2.3.4	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah..... 29
Tabel 2.3.5	Isu Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus..... 32
Tabel 2.4.1	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Berdasarkan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026..... 35
Tabel 2.4.2	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Berdasarkan KMDN Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas KMDN Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah..... 39
Tabel 3.1	Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2025-2029..... 53
Tabel 4.1.1	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah 2025-2029..... 58
Tabel 4.1.2	Rumusan Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 Perkiraan Maju Tahun 2027 Kabupaten Kudus..... 61
Tabel 4.2.1	Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Strategis Perangkat Daerah (Dinas Komunikasi dan Informatika) Tahun 2025-2029..... 76
Tabel 4.2.2	Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Operasional Perangkat Daerah (Dinas Komunikasi dan Informatika) Tahun 2026..... 77

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Rankir Renja PD) Tahun 2026 dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah sebagai tahapan pasca dilaksanakannya Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan Renja PD Tahun 2026 dan Rancangan Renstra PD Tahun 2025 – 2029, sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Proses Ranwal Renja PD Tahun 2026 dalam rangka penajaman, penyesuaian kepentingan dan kebutuhan atas pencapaian kebijakan yang tercantum dalam Rancangan Awal RKPD Tahun 2026. Hasil penyempurnaan Ranwal Renja PD Tahun 2026 kemudian menjadi bahan Forum Perangkat Daerah (Forum PD).

Forum PD merupakan tahapan yang wajib dilaksanakan oleh setiap perangkat daerah dalam rangka memperoleh masukan dari berbagai pihak untuk penajaman tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan beserta masing-masing indikator kinerjanya, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Awal PD Tahun 2026. Hasil pembahasan Forum PD dituangkan dalam berita acara hasil Forum PD Tahun 2025 yang selanjutnya menjadi bahan penyelarasan dan penyempurnaan Rancangan Akhir Renja PD Tahun 2026. Rancangan Akhir Renja PD Tahun 2026 yang telah disempurnakan .

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah mengamanatkan perlu adanya penyempurnaan sistem perencanaan dan penganggaran nasional, baik pada aspek proses dan mekanisme maupun tahapan pelaksanaan musyawarah perencanaan di tingkat pusat maupun daerah. Pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis

nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

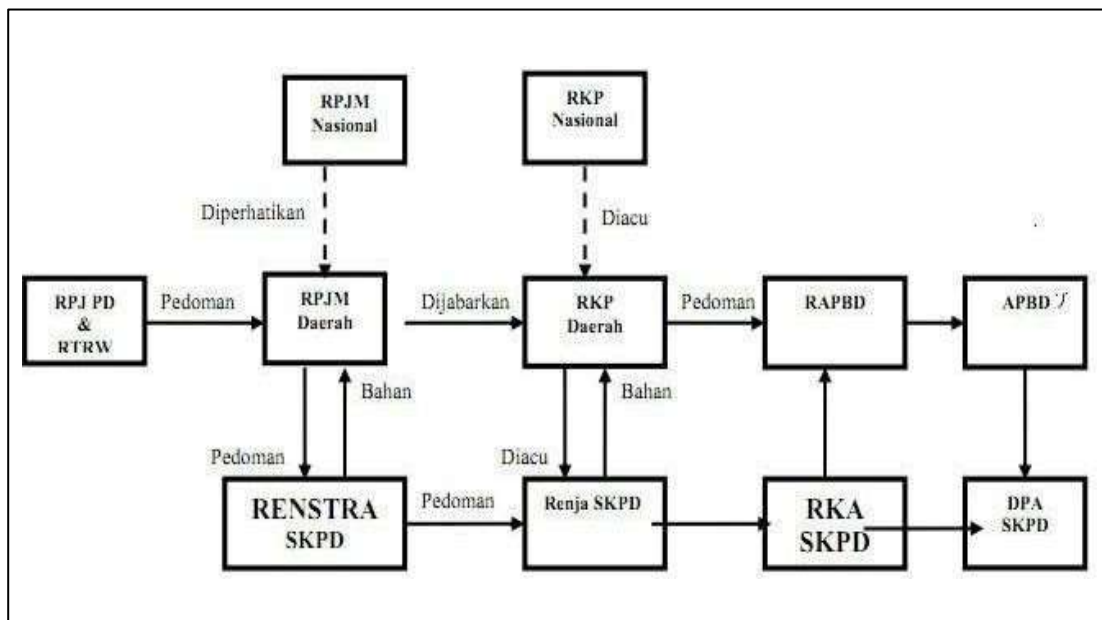
Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah. pasal 11 ayat 3 huruf b, disebutkan bahwa rencana perangkat daerah terdiri atas Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD, dan Renja Perangkat Daerah. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2026 disusun berdasarkan RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2026 yang digunakan sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan rancangan APBD Kabupaten Kudus Tahun 2026.

Adapun keterkaitan antara Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus terhadap dokumen perencanaan yang lain dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut :

Hubungan Rencana Kerja dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Lainnya



Dengan memperhatikan Gambar 1.1 dapat diketahui, bahwa pada tingkat perangkat daerah, dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dijadikan sebagai pedoman dalam penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah setelah disahkan melalui Keputusan Bupati dan ditetapkan Kepala Daerah menjadi Renja Perangkat Daerah yang akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah dengan mengacu pada KUA-PPAS yang telah disepakati oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD. RKA Perangkat Daerah yang telah sesuai dengan KUA-PPAS selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD. RAPBD yang telah disetujui Kepala Daerah dan pimpinan DPRD kemudian dievaluasi oleh Gubernur, untuk selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah menjadi APBD.

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2026 berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2025–2029; dan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Kudus Tahun 2026.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2026 disusun sebagai dokumen

perencanaan untuk periode 2026 yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata dan aspirasi masyarakat di bidang komunikasi dan informatika yang tumbuh dan berkembang di Kabupaten Kudus serta berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus;
13. Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus;
14. Peraturan Bupati Kudus Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 62);
15. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 10).
16. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024– 2026;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2025-2045;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
19. Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2025 tanggal 4 Juli 2025 tentang RKPd Kabupaten Kudus Tahun 2026,

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2026 yaitu menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus. Tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah :

- 1) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan program dan kegiatan antara daerah dengan provinsi dan pusat .
- 2) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan.
- 3) Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2026 disusun sebagai berikut :

Bab I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengertian Ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan Tinda

Lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang UU, PP, Perda dan Keentuan peraturan lainnya yang megatur tentang SOTK, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam peyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Pokok – pokok materi yang disampaikan antara lain :

- a. Realisasi rogram/ kegiatan/ sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan .
- b. Realisasi program/kegiatan/subkegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
- c. Realisasi program/ kegiatan/sb kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan.
- d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya atau terpenuhinya target kinerja rogram/kegiatan/ subkegiatan ;
- e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra perangkat daerah
- f. Kebijakan yang diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fnksi perangkat daerah

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD

2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Bab III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Bab IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan penjelasan mengenai :

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, meliputi jumlah program dan jumlah kegiatan, sifat penyebaran lokasi rogram dan kegiatan, dan total kebutuhan dana/pagu indikatif
yang dirinci menurut sumber pendanaannya
- c. Tabel rencana program dan kegiatan

Bab V. PENUTUP

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan Kepala Perangkat Daerah beserta cap stempel Perangkat Daerah.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian sasaran strategis berikut indikator kinerjanya, namun demikian juga terdapat beberapa sasaran strategis yang tidak berhasil diwujudkan pada empat tahun terakhir ini. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta obyek pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika maka dalam pelaksanaan diperlukan suatu indikator kinerja untuk mengukur tingkat capaian serta keberhasilan program dan kegiatan yang dilaksanakan. Terhadap sasaran maupun target indikator kinerja yang tidak berhasil diwujudkan tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan penanganan di masa mendatang. Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus dilakukan dengan cara membandingkan antara target yang tertuang dalam RKPD dengan realisasi masing-masing keluaran kegiatan.

Berdasarkan Tabel 2.1 Evaluasi Hasil Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2024, secara garis besar tercapai dapat diurai sebagai berikut :

- a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :
 - 1. Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik tercapai 90,49%
- b. Realisasi program/kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :
 - 1. Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan target indikator Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD) sebesar 43 nilai telah tercapai melalui 8 kegiatan yaitu:
 - 1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 3) Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat

Daerah

- 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Informasi dan Komunikasi Publik dengan pencapaian indikator Persentase respon masyarakat terhadap konten yang dipublikasikan sebesar 100% telah tercapai melalui 1 kegiatan yaitu :
 - 1) Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 3. Program aplikasi informatika dengan target indikator Nilai SPBE domain tata kelola sebesar 4,4 nilai telah tercapai melalui 2 kegiatan yaitu :
 - 1) Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 2) Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 4. Program penyelenggaraan statistik sektoral dengan target indikator program Indeks Pembangunan Statistik sebesar 2,8 indeks telah tercapai melalui 1 kegiatan yaitu :
 - 1) Penyelenggaraan statistik sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota.
 5. Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi dengan target indikator Indeks Keamanan Informasi (KAMI) sebesar 324 indeks telah tercapai melalui 1 kegiatan yaitu :
 - 1) Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- c. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan
- 1) Faktor utama terpenuhinya target kinerja program/kegiatan adalah dukungan dana dari APBD
 - 2) Perencanaan program/kegiatan yang berkualitas
 - 3) Koordinasi yang baik dengan instansi terkait

Untuk mengetahui sejauh mana pencapaian Renstra SKPD sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian
Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024 Kabupaten Kudus

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2024) yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD s/d Tahun 2024 (%)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Th. 2025 (tahun berjalan)	
						Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2025 / n- 1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	5	6	7	8	9
			K	K	K		
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
		Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	43 Nilai	39 Nilai	90,7		
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
		Persentase Capaian kinerja subgiat Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
		Jumlah Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah	8 Dokumen	8	100		
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3	100		
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						

		Persentase realisasi anggaran sesuai RAK, DPA/DPPA	100 persen	100	100		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 orang/bulan	28	100		
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12	100		
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12	100		
X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						
		Persentase BMD yang dikelola sesuai standar manajemen aset	100 persen	100	100		
X.XX.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						
		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1	100		
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
		Persentase ASN PD yang memenuhi 20 JP pertahun	12 Persen	12	100		
X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	6	120		
X.XX.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						
		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2000 orang	2000	100		
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						
		Cakupan layanan pendukung perkantoran sesuai standar	100 persen	100	100		
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						

		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	40 Paket	40	100		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantoryang Disediakan	1 paket	1	100		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	7	100		
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12	100		
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12	100		
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
		Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan	100 persen	100	100		
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel						
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 unit	2	100		
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 unit	6	100		
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
		Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	100 persen	100	100		
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
		Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	4 Laporan	4	100		
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						

		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12	100		
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
		Persentase BMD dalam kondisi baik	100 persen	100	100		
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	12	100		
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	50	100		
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK						
		Nilai Survey Kepuasan Publik	82 Nilai	83,7	102,07		
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						
		Persentase respon masyarakat terhadap konten yang dipublikasikan	100 persen	100	100		
2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik						
		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	8 Dokumen	8	100		
2.16.02.2.01.03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah						
		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	215 Dokumen	461	120		
2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik						
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	263 Dokumen	238	90,49		
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik						

		Jumlah Dokumen Hasil PelayananInformasi Publik	25 Dokumen	26	104		
2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media						
		Jumlah Layanan Hubungan Media	2 Layanan	2	100		
2.16.02.2.01.08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan						
		Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	1 Dokumen	1	100		
2.16.02.2.01.13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5 Unit	5	100		
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA						
		Nilai SPBE Domain Tata Kelola	4,4 Nilai	4,4	100		
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						
		Persentase perangkat daerah/unit kerja yang terlayani jaringan fiber optik	70 persen	70	100		
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah						
		Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	209 Unit	209	100		
2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						
		Jumlah aplikasi yang dikelola di pusat data	94 aplikasi	94	100		
2.16.03.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah						
		Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1 Unit	1	100		

2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik						
		Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	1 Unit	1	100		
2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah						
		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1	100		
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL						
		Indeks Pembangunan Statistik	2,8 indeks	2,88	102,86		
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota						
		Persentase ketercukupan data statistik sektoral	100 persen	100	100		
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral						
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1 Dokumen	1	100		
2.20.02.2.01.02	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi						
		Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	60 Orang	70	116,67		
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI						
		Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	324 indeks	324	100		
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						

		Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) dan atau Aplikasi Persandian	54 persen	54	100		
2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik						
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	1	100		
2.21.02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						
		Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	7 Perangkat Daerah	7	100		
JUMLAH							
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)					95,91		
Predikat Kinerja					Sangat Tinggi		

:

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :

Komunikasi dan kolaborasi yang baik antara Diskominfo dengan Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal, serta berbagai stakeholder lain dapat dilihat dengan telah diselesaikannya audit internal infrastruktur, dan aplikasi SPBE, serta telah diterapkannya ISO 27001. Dalam penyelenggaraan urusan statistik dan persandian, kerjasama dengan BPS, BSSN maupun Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah telah memberikan sumbangsih dalam peningkatan kompetensi SDM yang ada khususnya pada Dinas Kominfo dan OPD pada umumnya.

Kolaborasi serta komunikasi yang terjalin dengan baik antara Diskominfo dan stakeholder terkait (dalam hal ini para pegiat seni tradisional, insan pers, serta Diskominfo Kota Bandung) sehingga kegiatan Layanan Hubungan Media, dan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan target yang ada. Pengadaan sarpras telah terlaksana dengan baik setelah adanya penyesuaian kebutuhan pada anggaran perubahan.

Faktor penghambat keberhasilan kinerja :

Masih perlunya penyusunan regulasi terkait pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE, kebijakan detail terkait layanan SPLP dan Pusat Data, Update arsitektur SPBE (menunggu dokumen peta proses bisnis dari Bagian Organisasi yang baru akan dilaksanakan pada tahun 2025) dan penetapan arsitektur SPBE dengan SK Bupati, Penyusunan regulasi terkait Smart City serta kebijakan dan tata kelola dalam penyelenggaraan data geospasial. Beberapa kegiatan yang sebelumnya tertunda telah terlaksana seluruhnya. Situasi dan Kondisi Ekososbudpol di level lokal maupun nasional, berpengaruh terhadap keterlambatan pelaksanaan kegiatan seperti yang terjadi di tahun 2024 ini.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya :

Capaian IKU sangat baik, Capaian Program , Kegiatan dan subkegiatan di atas 90%, agar diertahankan dan ditingkatkan untuk yang belum mencapai 100%. Agar dipenuhi keterisian data sebagaimana tertuang di e walidata urusan kominfo, statistik dan persandian yang notabene adalah hasil kinerja di tingkat aktivitas ataupun subkegiatan yang tidak terlihat pada laporan evarenja ini yaitu an : Perangkat keras pheripheral TIK yang dikelola pemerintah daerah, Pedoman Penyelenggaraan Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas, Audit TIK Internal, eksternal, Khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik, Strategi Komunikasi Publik yang disusun, Konten Audio Video, Konten Audio, Pertemuan tatap muka, KIM, Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang manajemen data (urusan statistik), Kebijakan Tata Kelola Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang

Ditetapkan, Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan, Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi, Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Berbasis Non Elektronik, Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kabupaten/Kota (urusan persandian).

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Analisis kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika memberi gambaran target dan capaian pelayanan dengan menggunakan indikator SPM (standar pelayanan minimal) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Analisis kinerja pelayanan dapat digunakan sebagai metode untuk mengetahui indikator-indikator kinerja yang telah dipenuhi maupun belum dipenuhi. Analisis kinerja tersebut untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.2

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus

No	Indikator	SPM/ Standar t Nasiona l	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian				Proyeksi Th 2026 (n+)	Catatan
				Th 202 2 (n-3)	Th 202 3 (n-2)	Th 2024 (n-1)	Th 202 5 (n)	Th 202 2 (n-3)	Th 202 3 (n-2)	Th 2024 (n-1)	Th 2025 (n)		
1	2	3	4	12	6	7	8	11	12				14
1	Peningkatan indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)			2,68	-			3.38					
2	Nilai evaluasi SAKIP OPD			87,00	-			82,37					
3	Indeks Keterbukaan Informasi Publik			79,00	-			85.95					
4	Cakupan pelayanan data statistik sektoral			100%	-			100%					
5	Persentase fasilitasi persandian			18%	-			82%					
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)			-	2.87				3,38				
2	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah			-	91.00				70,95				
3	Indeks Keterbukaan Informasi Publik			-	81.00				93,84				
4	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)			-	50.00				50,23				
5	Rasio ketercukupan data statistik sektoral			-	60.00				100,00				
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)					4.23	4.23			4.23		4.23	
2	Indeks Keterbukaan Informasi Publik					93.84	93.84			88,18		89	
3	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah					82.39	82.40			74,8		82,41	

1	Indeks Pemerintahan Digital											4.25	
2	Indeks Pemerintahan Digital Domain kepuasan pengguna layanan digital pemerintah/ Indeks SPBE domain layanan SPBE											0.10 / 4.88	
3	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)											3.00	
4	Indeks Pemerintah Digital domain (keamanan siber)											0.03	

Keterangan :

1. Pada Indeks SPBE walaupun sudah memenuhi target dan predikat sangat baik dalam penerapan SPBE, tetapi harus ada peningkatan. Untuk meningkatkan Indeks SPBE adalah dengan meningkatkan pada domain tata kelola SPBE yaitu penyusunan peta proses bisnis (wewenang Bagian Organisasi) sebagai dasar dalam penyusunan arsitektur SPBE, dimana arsitektur SPBE ini yang nantinya akan menjadi pedoman dalam keterpaduan layanan yang ada di Kabupaten Kudus. sehingga perlu penganggaran untuk Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi/Sistem Informasi, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) TIK, Keamanan Informasi dan Keamanan Siber. Anggaran untuk menunjang SPBE harus dilihat sebagai investasi jangka panjang yang akan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas layanan publik. Oleh karena itu, perencanaan anggaran harus komprehensif dan mempertimbangkan seluruh aspek yang mendukung keberlanjutan SPBE.
2. Pada Indeks Keterbukaan Informasi Publik walaupun mendapatkan predikat sangat tinggi tetapi belum memenuhi target. Untuk meningkatkan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang perlu dilakukan yaitu dengan meningkatkan pengumpulan data keterbukaan informasi publik dari Perangkat Daerah serta meningkatkan komitmen pimpinan (Kepala Daerah), mempercepat respons atas aduan masyarakat, Optimalisasi Media Sosial, penggunaan aplikasi aduan secara maksimal sehingga perlu penganggaran untuk update aplikasi layanan pengaduan sehingga perlu pengadaan peralatan seperti apple macbook dan iphone, publikasi baik media cetak, online maupun televisi, pres tour, kemitraan komunikasi.
3. Nilai evaluasi SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus belum tercapai sesuai target dikarenakan terdapat perubahan regulasi yang mengatur tentang parameter Penilaian AKIP Perangkat Daerah. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan nilai SAKIP yaitu dengan menindaklanjuti rekomendasi LHE SAKIP dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus Selain hal tersebut, pada Dinas Komunikasi dan Informatika belum memiliki pegawai yang pernah mengikuti diklat SAKIP. Maka diperlukan anggaran untuk pengiriman peserta diklat yang linear dengan SAKIP sebagai upaya peningkatan Evaluasi SAKIP.

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagaimana dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus. Dalam melaksanakan kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus menjalankan 3 (tiga) Urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

1. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Ruang lingkup kinerja urusan Komunikasi dan Informatika adalah komunikasi publik yang berarti bagaimana penyebaran informasi kebijakan dan program pemerintah yang dikomunikasikan kepada masyarakat. Berikutnya penyiaran dan media, pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK), pelayanan informatika dan e-Government melalui digitalisasi pelayanan pemerintahan. Regulasi dan pengawasan keamanan informasi dan perlindungan data pribadi juga menjadi bagian dari kinerja urusan komunikasi dan informatika. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam penggunaan TIK secara cerdas dan aman sebagai bagian dari literasi digital harus dikawal sebagai bentuk dukungan daerah kepada Pemerintah Pusat dengan agenda peningkatan literasi digital masyarakat. Pemerintah Kabupaten Kudus telah berkinerja dalam upaya menjalankan mandat tugas dan fungsinya di bidang komunikasi dan informatika. Berikut capaian kinerja urusan Komunikasi dan informatika:

Tabel 2.3.1
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika							
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	77	88.44	85.95	93.84	88.18
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Nilai SPBE domain Tata Kelola	Nilai	2.43	1.90	3.00	4.40	3.90

Nilai Keterbukaan Informasi Publik pada tahun 2024 sebesar 88,18 mengindikasikan nilai yang cukup tinggi. Meski nilai cukup tinggi, ada beberapa

masalah yang ditemui yaitu belum efektifnya penerapan standar kerja baku pengelolaan pengaduan dan pelayanan informasi masyarakat, Belum optimalnya pengelolaan sumberdaya komunikasi publik.

Nilai domain tata kelola SPBE merupakan salah satu domain dari penilaian SPBE . Domain tata kelola SPBE menunjukkan sejauh mana tata Kelola SPBE sesuai dengan standar dan kerangka kerja yang berlaku. Semakin tinggi nilai indeksnya, semakin baik implementasi SPBE. Meski capaian nilai tinggi, ada beberapa masalah yang menjadi penghambat yaitu Perencanaan strategis SPBE, Teknologi informasi dan komunikasi, Penyelenggara SPBE. Indikator penilaian SPBE domain tata kelola meliputi: Belum sinkronnya arsitektur SPBE daerah dengan arsitektur SPBE Nasional, Belum optimalnya pengelolaan TIK pendukung SPBE, belum terintegrasinya aplikasi informatika dalam penyelenggaraan layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik serta belum semua layanan Perangkat Daerah menggunakan Teknologi Informasi.. Tantangan kinerja urusan komunikasi dan informatika ke depan adalah bagaimana meningkatkan jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah dan meningkatkan kualitas pengelolaan aplikasi informatika dengan optimalisasi sumberdaya TIK yang dimiliki.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat 1 sub urusan yang menjadi kewenangan urusan Statistik yaitu sub urusan Statistik Sektoral. Indeks Pembangunan Statistik (IPS) adalah ukuran yang menggambarkan kualitas penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) dan statistik sektoral. IPS juga digunakan untuk mengukur capaian penyelenggaraan SDI dan data statistik sektoral di berbagai instansi. Meskipun sempat menurun di 2023, tren kenaikan di 2024 menunjukkan perbaikan dalam sistem statistik. Untuk menjaga keberlanjutan peningkatan ini, perlu adanya inovasi dalam pengelolaan data serta peningkatan sumber daya manusia dan teknologi statistik.

Tabel 2.3.2

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Bidang Statistik Tahun 2020-2024

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
Urusan Pemerintahan Bidang Statistik							
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Indeks Pembangunan Statistik	Indeks	N/A	N/A	2.70	2.10	2.88

Capaian Nilai Indeks Pembangunan Statistik di 2024 tinggi tapi masih ditemui beberapa masalah yang menghambat yaitu masih terdapat perbedaan data untuk indicator yang sama di produsen data, belum adanya jadwal rilis data dari masing – masing OPD, Pengumpulan data lama karena di produsen data belum dilakukan pengolahan atau masih data mentah. Belum dilaksanakannya kegiatan preview dan evaluasi setelah output keluar sehingga belum ada data statistik belum sepenuhnya digunakan sebagai dasar perencanaan.

3. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat 1 sub urusan yang menjadi kewenangan urusan Persandian yaitu sub urusan Persandian untuk pengamanan informasi. Indeks Keamanan Informasi (KAMI) adalah alat untuk mengevaluasi kesiapan pengamanan informasi di suatu organisasi, terutama dalam konteks pengelolaan keamanan informasi. Indeks ini dirancang untuk membantu organisasi menilai sejauh mana mereka telah menerapkan langkah-langkah keamanan informasi yang diperlukan untuk melindungi data dan sistem mereka dari ancaman. Capaian Indeks Keamanan Informasi (KAMI) di Kabupaten Kudus mengalami peningkatan pesat dari 96 (2020) hingga 499 (2024) dengan kategori tinggi, yang menunjukkan kemajuan dalam pengelolaan keamanan siber di berbagai sektor. Namun, dengan semakin canggihnya ancaman siber, investasi dalam teknologi, regulasi, dan pelatihan harus terus ditingkatkan agar keamanan informasi tetap terjaga.

Tabel 2.3.3
 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
 Bidang Persandian Tahun 2020-2024

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
Urusan Pemerintahan Bidang Persandian							
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANNA INFORMASI	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Indeks	96	170	247	324	499

Capaian Nilai Indeks Keamanan Informasi (KAMI) di 2024 tinggi tapi masih ditemui beberapa masalah yang menghambat yaitu kurangnya SDM yang menangani keamanan informasi.

Setelah mempelajari dan memahami hasil capaian kinerja dan analisis gambaran umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus, maka masalah pokok, masalah dan akar masalah yang dihadapi dalam pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan tugas dan fungsi dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut :

Tabel 2.3.4
 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi	a. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung kinerja pemerintah.	a. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informatika pada Perangkat Daerah; b. Belum sinkronnya arsitektur SPBE daerah dengan arsitektur SPBE Nasional; c. Belum optimalnya pengelolaan TIK pendukung SPBE; d. belum terintegrasinya aplikasi informatika dalam penyelenggaraan layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik.

		b. Belum optimalnya penyelenggaraan satu data Indonesia.	a. belum optimalnya kualitas ketersediaan data statistik sektoral. b. Belum dilaksanakannya kegiatan preview dan evaluasi setelah output keluar c. Belum optimalnya tindak lanjut hasil kegiatan statistik dalam perencanaan pembangunan
		c. Tingginya resiko keamanan informasi pemerintah daerah	a. kapasitas pengelola keamanan informasi dan persandian pemerintah daerah belum optimal. b. Belum optimalnya sistem kerja atau Kerangka kerja keamanan informasi
2	Keterbukaan informasi publik belum optimal	Belum optimalnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik	a. belum efektifnya penerapan standar kerja baku pengelolaan pengaduan dan pelayanan informasi masyarakat; b. Belum optimalnya pengelolaan sumberdaya komunikasi publik; c. belum optimalnya penyebarluasan informasi dan komunikasi publik.

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Melihat dari gambaran pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus, sasaran jangka menengah pada Renstra K/L, implikasi RTRW bagi pelayanan perangkat daerah bagi pelayanan perangkat daerah maka dapat ditentukan isu-isu strategis terkait pelaksanaan pembangunan di Dinas Komunikasi dan Informatika.

Dari hasil pembobotan terhadap isu-isu tersebut, maka isu strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus adalah “ belum optimalnya tata kelola pemerintahan daerah berbasis teknologi informasi”. Berikut Isu Strategis Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2025-2029.

Tabel 2.3.5
Isu Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
-	- Masalah Pokok : Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi - Masalah : a. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung kinerja pemerintah. b. Belum optimalnya penyelenggaraan satu data Indonesia. c. Tingginya resiko keamanan informasi pemerintah daerah - Akar Masalah : a.1. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informatika pada Perangkat Daerah; a.2. Belum sinkronnya arsitektur SPBE daerah dengan arsitektur SPBE Nasional; a.3. Belum optimalnya pengelolaan TIK pendukung SPBE; a.4. belum terintegrasinya aplikasi informatika dalam penyelenggaraan layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik. b.1. belum optimalnya kualitas ketersediaan data statistik sektoral. b.2. Belum dilaksanakannya kegiatan preview dan evaluasi setelah output keluar	Belum optimalnya reformasi birokrasi dalam pelayanan publik, keamanan dan kapasitas fiskal.	Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.	Transformasi digital	Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis	belum optimalnya tata kelola pemerintahan daerah berbasis teknologi informasi

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
	b.3. Belum optimalnya tindak lanjut hasil kegiatan statistik dalam perencanaan pembangunan c.1. kapasitas pengelola keamanan informasi dan persandian pemerintah daerah belum optimal. c.2. Belum optimalnya sistem kerja atau Kerangka kerja keamanan informasi					
	- Masalah Pokok : Keterbukaan informasi publik belum optimal - Masalah : Belum optimalnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik - akar masalah : a. belum efektifnya penerapan standar kerja baku pengelolaan pengaduan dan pelayanan informasi masyarakat; b. Belum optimalnya pengelolaan sumberdaya komunikasi publik; c. belum optimalnya penyebarluasan informasi dan komunikasi publik.					

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD Dinas Komunikasi dan Informatika yang telah disusun dengan berdasar pada RPJMD selanjutnya disesuaikan dengan analisis perkembangan dinamika kebutuhan yang didasarkan pada tugas pokok dan fungsi dari Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan juga mengakomodir isu-isu penting yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya.

Dalam melakukan review dilakukan proses perbandingan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2026. Dari analisis kebutuhan diketahui bahwa dibutuhkan penyesuaian pagu anggaran pada masing-masing sub kegiatan. Penyesuaian tersebut dilakukan karena adanya perubahan volume kebutuhan barang/jasa/modal, ketersediaan pagu anggaran, dan perkembangan Satuan Harga Satuan (SHS). Hasil review tersebut tidak merubah secara signifikan output kegiatan / sub kegiatan sehingga indikator-indikator program / kegiatan / sub kegiatan dapat dipertahankan agar tetap tercapai.

Review terhadap rancangan akhir RKPD selengkapnya dapat dilihat pada tabel

2.5 Review terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2026.

Tabel 2.4.1
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Berdasarkan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026

No Rekening	Nama Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target		Pagu Anggaran TA. 2026	Perkiraan Maju TA. 2027	Penanggungja wab
			Vol	Satuan			
X.XX	XX				19.053.952.000	0	
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian kinerja sub kegiatan Perangkat Daerah*	100,00	%	7.000.000	0	
X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8,00	Dokumen	1.100.000	0	
X.XX.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3,00	Laporan	5.900.000	0	
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA*	100,00	%	4.195.744.000	0	
X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26,00	Orang/bulan	4.075.744.000	0	
X.XX.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12,00	Dokumen	100.000.000	0	
X.XX.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD	12,00	Dokumen	20.000.000	0	
X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang dikelola sesuai standar manajemen aset*	100,00	%	6.300.000	0	
X.XX.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1,00	Dokumen	6.300.000	0	
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN PD yang memenuhi 20 JP pertahun*	100,00	%	9.880.074.000	0	
X.XX.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3,00	Orang	150.000.000	0	
X.XX.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	500,00	Orang	9.730.074.000	0	
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan pendukung perkantoran yang sesuai standar*	100,00	%	260.700.000	0	
X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	40,00	Paket	53.330.000	0	
X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1,00	Paket	35.362.000	0	

X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7,00	Paket	20.162.000	0	
X.XX.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12,00	Dokumen	10.800.000	0	
X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12,00	Laporan	141.046.000	0	
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan*	100,00	%	175.000.000	0	
X.XX.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2,00	Unit	15.860.000	0	
X.XX.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6,00	Unit	159.140.000	0	
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu*	100,00	%	4.109.134.000	0	
X.XX.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,00	Laporan	3.500.000	0	
X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12,00	Laporan	4.105.634.000	0	
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik*	100,00	%	420.000.000	0	
X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12,00	Unit	370.821.000	0	
X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50,00	Unit	49.179.000	0	
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				6.374.697.000	0	
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Publik	84,00	Nilai	5.116.570.000	0	
		Nilai Kematangan Organisasi Perangkat daerah (KOPD)*	45,00	Nilai			
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase respon masyarakat terhadap konten yang dipublikasikan	100,00	%	5.116.570.000	0	
2.16.02.2.01.0002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	8,00	Dokumen	190.500.000	0	

2.16.02.2.01.0003	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	230,00	Dokumen	313.500.000	0	
2.16.02.2.01.0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	200,00	Dokumen	4.172.570.000	0	
2.16.02.2.01.0006	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	25,00	Dokumen	85.000.000	0	
2.16.02.2.01.0007	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	2,00	Layanan	190.000.000	0	
2.16.02.2.01.0008	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	2,00	Dokumen	65.000.000	0	
2.16.02.2.01.0013	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4,00	Unit	100.000.000	0	
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Nilai SPBE domain tatakelola	3,50	Nilai	1.258.127.000	0	
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah/unit kerja yang terlayani jaringan fiber optik	76,00	%	1.000.000.000	0	
2.16.03.2.01.0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	209,00	Unit	1.000.000.000	0	
2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aplikasi yang dikelola di pusat data	98,00	aplikasi	258.127.000	0	
2.16.03.2.02.0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1,00	Unit	100.000.000	0	
2.16.03.2.02.0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	1,00	Unit	58.127.000	0	
2.16.03.2.02.0008	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	0,00	Layanan	0	0	
2.16.03.2.02.0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1,00	Dokumen	100.000.000	0	
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				155.075.000	0	
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Indeks Pembangunan Statistik	3,00	Indeks	155.075.000	0	

2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercukupan data statistik sektoral	100,00	%	155.075.000	0	
2.20.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1,00	Dokumen	140.000.000	0	
2.20.02.2.01.0002	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	60,00	Orang	15.075.000	0	
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				59.050.000	0	
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	300,00	indeks	59.050.000	0	
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) dan atau Aplikasi Persandian	57,00	%	59.050.000	0	
2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1,00	Laporan	40.000.000	0	
2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	9,00	Perangkat Daerah	19.050.000	0	
					25.642.774.000		

Tabel 2.4.2

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Berdasarkan KMDN Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas KMDN Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan		
Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi
2	3	4	5	6	7	8	9	10
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			25.642.774.000				12.952.468.100	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			25.428.649.000				25.428.649.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	44	19.153.952.000	Kab. Kudus	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	44	8.164.822.252	
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian kinerja subgiat Perangkat Daerah	100 persen	7.000.000	Kab. Kudus	Persentase Capaian kinerja subgiat Perangkat Daerah	100 persen	11.604.000	

Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dokumen	1.100.000	Kab. Kudus	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14 dokumen	8.424.000	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	855.000	Kab. Kudus	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	795.000	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan
Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	5.045.000	Kab. Kudus				Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	2.385.000	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA	100 persen	4.028.514.000	Kab. Kudus	Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA	100 persen	4.940.949.000	
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	26 orang/bulan	3.918.276.000	Kab. Kudus	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	34 orang/bulan	4.857.954.000	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan
Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 dokumen	90.000.000	Kab. Kudus	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 dokumen	90.000.000	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	20.238.000	Kab. Kudus	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	9.015.000	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan

Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang dikelola sesuai standar manajemen aset	100 persen	6.200.000	Kab. Kudus	Persentase BMD yang dikelola sesuai standar manajemen aset	100 persen	6.000.000	
Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang milik daerah SKPD	1 dokumen	6.200.000	Kab. Kudus	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang milik daerah SKPD	1 dokumen	6.000.000	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN PD yang memenuhi 20 JP pertahun	12 persen	9.505.840.000	Kab. Kudus	Persentase ASN PD yang memenuhi 20 JP pertahun	12 persen	470.217.000	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	3 orang	150.000.000	Kab. Kudus	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	3 orang	45.217.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Sosialisasi Peraturan Perundangan-undangan	Jumlah orang yang mnegikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	500 orang	9.355.840.000	Kab. Kudus	Jumlah orang yang mnegikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	500 orang	425.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan pendukung perkantoran yang sesuai standar	100 persen	260.600.000	Kab. Kudus	Cakupan layanan pendukung perkantoran yang sesuai standar	100 persen	223.786.352	
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	40 paket	53.230.000	Kab. Kudus	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	40 paket	34.815.252	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 paket	35.362.000	Kab. Kudus	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 paket	26.400.600	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan

Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	7 paket	20.162.000	Kab. Kudus	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	7 paket	8.604.500	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	12 dokumen	10.800.000	Kab. Kudus	Jumlah dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	12 dokumen	10.800.000	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Lapoan Penyelenggaraan Rapat Koodinasi dan Konsultasi Publik	12 laporan	141.046.000	Kab. Kudus	Jumlah Lapoan Penyelenggaraan Rapat Koodinasi dan Konsultasi Publik	12 laporan	141.006.000	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan	100 persen	270.000.000	Kab. Kudus	Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan	100 persen	237.572.000	
Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	jumlah paket mebel yang disediakan	2 unit	15.860.000	Kab. Kudus	jumlah paket mebel yang disediakan	11 unit	14.705.000	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	6 unit	254.140.000	Kab. Kudus				
Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	17 Unit	222.867.000	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	100 persen	3.750.000.000	Kab. Kudus	Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	100 persen	2.234.174.900	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4 laporan	3.500.000	Kab. Kudus	jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4 laporan	4.000.000	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	3.746.500.000	Kab. Kudus	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	1.672.414.900	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan
Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	28 laporan	557.760.000	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	100 persen	317.000.000	Kab. Kudus	Persentase BMD dalam kondisi baik	100 persen	263.386.000	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas perasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	12 unit	267.829.000	Kab. Kudus	jumlah kendaraan dinas perasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	12 unit	228.920.000	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	50 unit	49.171.000	Kab. Kudus	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	50 unit	34.466.000	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan

PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Publik	83	5.016.510.000	Kab. Kudus	Persentase masyarakat yang mengakses dan terlibat terhadap penyebaran informasi publik Pemerintah Daerah	12.1 Persentase	3.677.101.288	
Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase respon masyarakat terhadap konten yang dipublikasikan	100 persen	5.016.510.000	Kab. Kudus	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	70.37 persen	3.677.101.288	
Sub Kegiatan Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	2 Laporan	190.000.000	Kab. Kudus	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	2 Laporan	357.022.000	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Sub Kegiatan Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	1 Komunitas	65.000.000	Kab. Kudus	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	1 Komunitas	50.000.000	Kab. Kudus, Dawe, Lau
Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	25 Permohonan	65.700.000	Kab. Kudus	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	25 Permohonan	47.904.000	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan

Sub Kegiatan Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	52 Rekomendasi	190.500.000	Kab. Kudus	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	52 Rekomendasi	189.850.000	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan
Sub Kegiatan Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	100%	3.601.220.000	Kab. Kudus	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	100%	1.970.656.200	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan
Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	2 Media	505.390.000	Kab. Kudus	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	2 Media	1.061.669.088,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Sub Kegiatan Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	200 Konten	398.700.000	Kab. Kudus				
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Nilai SPBE domain tata kelola	3,3	1.258.127.000	Kab. Kudus	Nilai IPD aspek Layanan Digital Indeks SPBE aspek Tatakelola	0.10 nilai 4.88 indeks	945.428.560	
Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aplikasi yang dikelola di pusat data	96 aplikasi	1.258.127.000	Kab. Kudus	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo Persentase RT dengan akses internet (IUP)	100 Persentas e 75.77 Persentase	945.428.560	

Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan fasilitasi penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemda	9	20.000.000	Kab. Kudus				
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pusat Kendali Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data	1 Dokumen	150.000.000	Kab. Kudus	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali	1 Laporan	95.016.800	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan
Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Reviu Arsitektur dan Peta Rencana SPBE	Jumlah Dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan	1 Dokumen	50.000.000	Kab. Kudus				
Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah dokumen koordinasi pelaksanaan manajemen SPBE	1 Dokumen	20.000.000	Kab. Kudus	Jumlah dokumen koordinasi pelaksanaan manajemen SPBE	1 Dokumen	56.360.000	
Sub Kegiatan Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus sesuai dengan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	2 Aplikasi	130.000.000	Kab. Kudus				
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	2 Aplikasi	30.000.000	Kab. Kudus				
Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten / Kota Cerdas	41 Perangkat Daerah	10.000.000	Kab. Kudus	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten / Kota Cerdas	1 Dokumen	8.370.000	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah	Jumlah perangkat daerah di Pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	12 Perangkat Daerah	798.127.000	Kab. Kudus	Jumlah perangkat daerah di Pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	12 Perangkat Daerah	700.452.760,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Sub Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Jumlah dokumen fasilitas dalam rangka penyelenggaraan audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	1 Dokumen	50.000.000	Kab. Kudus	Jumlah dokumen fasilitas dalam rangka penyelenggaraan audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	1 Dokumen	5.278.000	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan
Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE					Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	2 Aplikasi	61.360.000	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan
Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan					Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	2 Aplikasi	18.591.000	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			155.075.000				69.222.000,00	
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Indeks Pembangunan Statistik	2,9	155.075.000	Kab. Kudus	Persentase Perangkat Daerah dengan SSD yang akurat dan diandalkan	93 Persentase	69.222.000,00	

Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercukupan data statistik sektoral	100 persen	155.075.000	Kab. Kudus	Persentase organisasi perangkat daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100 persen	69.222.000,00	
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	180 orang	55.075.000	Kab. Kudus	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	180 orang	36.304.000	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan
Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	100%	40.000.000	Kab. Kudus				
Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral sesuai standar	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	3 Dokumen	30.000.000	Kab. Kudus	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	100 Persen	32.918.000	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			59.050.000				95.894.000	

PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	270 indeks	59.050.000	Kab. Kudus	Tingkat keamanan informasi Pemerintah Daerah	55.56 Persentase	95.894.000	
Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) dan atau Aplikasi Persandian	56 persen	54.129.000	Kab. Kudus	Tingkat keamanan informasi pemerintah	510 indeks	95.894.000	
Subkegiatan Penetapan kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1 Dokumen	20.000.000					
Subkegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota berbasis elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	20.921.000	Kab. Kudus				
Subkegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan Layanan Keamanan Informasi	8 Perangkat Daerah	18.129.000	Kab. Kudus				
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah					Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	8 Perangkat Daerah	16.452.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan

Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah					Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian	1 Dokumen	79.442.000	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan
TOTAL			25.642.774.000				13.175.335.100	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada dasarnya, RKP (Rencana Kerja Pemerintah) dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan yang saling berkesinambungan. RKP (tingkat nasional) menjadi acuan bagi RKPD (tingkat provinsi), dan RKPD akan diterjemahkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Informasi mengenai Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah tahun 2026 masih bersifat umum, karena dokumen finalnya belum dipublikasikan secara resmi. Namun, dari berbagai sumber yang tersedia, kita bisa mendapatkan gambaran dan menelaah arah kebijakan yang akan diambil.

Pada dasarnya, RKP dan RKPD adalah dokumen perencanaan yang saling berkesinambungan. RKP (tingkat nasional) menjadi acuan bagi RKPD (tingkat provinsi), dan RKPD akan diterjemahkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

3.1.1 RKP 2026 (Rencana Kerja Pemerintah)

RKP 2026 akan menjadi tahun pertama dari periode pemerintahan yang baru. Oleh karena itu, prioritas dan arah kebijakannya akan sangat selaras dengan visi dan misi presiden terpilih. Berdasarkan informasi yang ada, tema utama RKP 2026 adalah "Penguatan Ketahanan Nasional dan Akselerasi Transformasi Ekonomi".

Meskipun detail spesifik untuk bidang Kominfo, Statistik, dan Persandian belum dirilis, kita dapat mengidentifikasi beberapa arahan umum yang akan menjadi fokus utama:

- **Pemerataan Akses Digital:** Pemerintah akan melanjutkan upaya untuk mempercepat ketersediaan infrastruktur digital yang merata di seluruh Indonesia. Hal ini sejalan dengan tema transformasi ekonomi, di mana akses internet menjadi kunci untuk mendorong ekonomi digital dan produktivitas masyarakat.
- **Pengamanan Informasi dan Siber:** Peningkatan keamanan siber dan persandian akan menjadi isu krusial untuk melindungi data strategis negara dan sistem informasi publik. Adanya ancaman siber yang terus berkembang akan mendorong pemerintah untuk memperkuat kebijakan dan teknologi persandian.

- **Pemanfaatan Data untuk Kebijakan (Big Data):** Bidang statistik akan sangat berperan dalam menyediakan data yang akurat dan terintegrasi. Kebijakan akan diarahkan pada penguatan kapasitas statistik sektoral dan pemanfaatan big data untuk mendukung perumusan kebijakan yang lebih responsif dan berbasis bukti.
- **Peningkatan Layanan Publik Berbasis Digital (e-Government):** Transformasi birokrasi dan layanan publik melalui sistem elektronik akan terus didorong. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pemerintah.

3.1.2 RKPD Provinsi Jawa Tengah 2026

RKPD Provinsi Jawa Tengah tahun 2026 akan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029. Tema pembangunan yang diusung adalah "Penguatan Perekonomian Daerah, Kualitas Sumber Daya Manusia, Ketahanan Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup serta Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis".

Dalam konteks bidang Kominfo, Statistik, dan Persandian, kebijakan yang akan diterapkan di Jawa Tengah kemungkinan besar akan berfokus pada:

- **Peningkatan Konektivitas dan Literasi Digital:** Upaya untuk menjangkau wilayah 3T (Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal) dengan infrastruktur digital akan menjadi prioritas. Selain itu, program literasi digital akan digencarkan untuk memastikan masyarakat dapat memanfaatkan teknologi secara produktif dan aman.
- **Penguatan Statistik Sektoral dan Satu Data Indonesia (SDI):** Pemerintah Provinsi akan berupaya menyinkronkan data dari berbagai perangkat daerah (OPD) untuk mewujudkan kebijakan "Satu Data Indonesia". Ini akan memudahkan pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan yang lebih akurat, khususnya dalam bidang ekonomi dan sosial.
- **Pengamanan Sistem Elektronik Pemerintah Daerah:** Sejalan dengan RKP, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan memperkuat sistem persandian dan keamanan siber untuk melindungi data-data pemerintahan dari ancaman siber.
- **Transformasi Layanan Publik:** Peningkatan layanan publik berbasis digital akan dioptimalkan, seperti layanan perizinan, informasi publik, dan pengaduan masyarakat melalui berbagai platform digital.

Secara keseluruhan, baik RKP 2026 maupun RKPD Provinsi Jawa Tengah 2026 menunjukkan komitmen yang kuat terhadap transformasi digital sebagai pilar utama pembangunan. Kebijakan di bidang Kominfo, Statistik, dan Persandian akan menjadi instrumen penting untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, dengan fokus

pada pemerataan akses, keamanan siber, dan pemanfaatan data yang akurat.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika

Visi Bupati dan wakil Bupati terpilih periode 2025-2030 yang dituangkan dalam RPJMD Tahun 2025-2029 yaitu “Menuju Masyarakat Kudus Sejahtera, Harmoni dan Taqwa”.

Misi untuk mewujudkan visi tersebut adalah:

1. Pemberdayaan Ekonomi Rakyat;
2. Mandiri Kesehatan dan berdikari;
3. Pendidikan berkarakter, kearifan budaya;
4. Masyarakat Kudus yang agamis, guyub rukun, toleransi dan menjaga persatuan NKRI;
5. Infrastruktur mantap dan kualitas lingkungan hidup, serta misi tambahan berkaitan dengan tata Kelola pemerintahan yang dirumuskan;
6. Terwujudnya tata kelola yang adaptif dan pelayanan publik yang profesional;

Berdasarkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susuna Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus, Dinas Komunikasi dan Informatika selaku unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian yang menjadi kewenangan daerah dan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan Sekretaris Daerah. maka sesuai tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika mendukung pada misi ke-6 Terwujudnya tata kelola yang adaptif dan pelayanan publik yang profesional.

Selaras dengan arah pembangunan dalam dokumen RPJPD Kabupaten Kudus Tahun 2025-2045 dan Rancangan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2025-2029 serta menganalisis rumusan visi, misi, permasalahan dan isu strategis pembangunan maka dirumuskan tujuan dan sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus sebagai berikut :

Tujuannya adalah Terwujudnya transformasi layanan publik berbasis digital.

Sedangkan sasaran strategisnya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Informasi dan komunikasi layanan publik berbasis digital;
2. Terwujudnya layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan;
3. Meningkatnya keamanan informasi.

Keterkaitan antara dengan sasaran RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2025-2029 dengan tujuan dan sasaran Rencana strategis yang akan dilaksanakan dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2025-2029

NSPK DAN Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Formula Indikator (Indikator Tujuan/Sasaran) dan Sumber Referensi Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun Ke-					
							2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Mewujudkan birokrasi berintegritas dan responsif	Terwujudnya transformasi layanan publik berbasis digital		Indeks Pemerintahan Digital / Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	a. Indeks Pemerintahan Digital yang dinilai dari 9 aspek, yaitu Aspek Strategi dan Rencana (5%), Aspek Tata Kelola dan Manajemen (5%), Aspek Teknologi Digital (20%), Aspek Audit Teknologi Digital (6%), Aspek Keamanan Siber (9%), Aspek Kapabilitas dan Budaya Digital (10%), Aspek Pengelolaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi (10%), Aspek Keterpaduan Layanan Digital Pemerinatah (15%), Aspek Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah (20%). b. Nilai indeks SPBE dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai indeks domain dan bobot domain. Rumus penghitungan nilai indeks SPBE dijabarkan sebagai berikut: Rumus Indeks SPBE (dapat dilihat pada SEB Buku I Pedoman Penyelarasan Muatan RPJPD dengan RPJPN) Langkah Perhitungan:	Indeks	NA / 4.23	NA / 4.23	1 / 4.25	1.2 / 4.27	1.3 / 4.29	1.5 / 4.31	1.6 / 4.33

				1. dilakukan perhitungan tingkat kematangan indikator-indikator pada 4 domain SPBE. Domain tersebut adalah Domain Kebijakan, Domain Tata Kelola, Domain Manajemen dan, Domain Layanan; 2. Masing-masing tingkat kematangan dikelompokkan/scor dalam 5 tingkatan (1 sampai dengan 5); 3. Hasil perhitungan dijumlah; 4. Jumlah hasil perhitungan tingkat kematangan pada masing-masing domain dikalikan bobot pada masing-masing domain. Bobot tersebut adalah Domain Layanan SPBE 45 %, Domain Kebijakan Internal SPBE 13 %, Domain Tata Kelola 25 % dan, Domain Manajemen SPBE 17 %; dan 5 adalah skor maksimal.								
		Meningkatnya Informasi dan komukinasi layanan publik berbasis digital	Indeks Pemerintahan Digital Domain kepuasan pengguna layanan digital pemerintah/Indeks SPBE domain layanan SPBE	a. Indeks Pemerintahan Digital Aspek Kepuasan pengguna layanan digital pemerintah dilihat dari indikator : tingkat kepuasan pengguna layanan digital pemerintah, tingkat pemenuhan kualitas layanan digital, tingkat pemanfaatan layanan digital . b. Indeks SPBE dari Kementrian PAN RB domain layanan SPBE	Indeks	NA / 4.88	NA / 4.88	0.10 / 4.88	0.11 / 4.88	0.12 / 4.88	0.13 / 4.88	0.14 / 4.88
		Terwujudnya layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Indeks	2.88	2.90	3.00	3.10	3.15	3.20	3.25

		Meningkatnya keamanan informasi	Indeks Pemerintah Digital domain keamanan siber	Indeks Pemerintahan Digital aspek keamanan siber dilihat dari indikator : tingkat kematangan keamanan siber, tingkat kematangan penerapan kriptografi nasional untuk keamanan data, tingkat kematangan kapabilitas penanganan insiden.	Indeks	NA	NA	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07
--	--	---------------------------------	---	---	--------	----	----	------	------	------	------	------

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus, 2025

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2026

Pada Tahun 2026, total pagu indikatif yang dibutuhkan dalam Renja Rancangan Akhir Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2026 berasal dari Belanja Langsung sejumlah Rp. 13.175.335.100,- yang bersumber dari APBD murni dan dana DBHCHT.

Rencana Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2026 merupakan urusan wajib bukan pelayanan dasar dengan 3 urusan yaitu urusan komunikasi dan informatika, urusan statistik dan urusan persandian yang terdiri dari 5 program yang masing-masing dilaksanakan oleh sekretariat dan 2 (dua) bidang, yang jumlah totalnya terdiri atas 12 kegiatan, 37 sub kegiatan dibiayai dengan APBD dan 1 sub kegiatan dibiayai dengan dana DBHCHT.

Sekretariat menjalankan fungsi umum kesekretariatan melalui 1 program yang terdiri atas 8 kegiatan terkait (1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, (2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, (3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, (4) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, (5) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, (6) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, (7) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, (8) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Rencana program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2026 terdiri dari 5 program dan 12 kegiatan sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN/KOTA, yang didukung dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK, yang didukung dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 3. PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA, yang didukung dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 4. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL yang didukung dengan kegiatan sebagai berikut :
 - b. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 5. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI yang didukung dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Total kebutuhan pagu indikatif dalam Rencana program dan kegiatan Rancangan Akhir Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2026 adalah sebesar Rp. 13.175.335.100 berasal dari sumber dana APBD Kabupaten Kudus dan dana DBHCHT.

4.1.1 Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan subkegiatan

Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan subkegiatan yaitu KMDN Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas KMDN Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024-2026.

Tabel 4.1.1
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
Terwujudnya birokrasi berintegritas dan responsif	T1Terwujudnya transformasi layanan publik berbasis digital				T1 Indeks Pemerintahan Digital / Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		
		S1.1 Meningkatnya Informasi dan komukinasi layanan publik berbasis digital			S1.1 Indeks Pemerintahan Digital Domain kepuasan pengguna layanan digital pemerintah/Indeks SPBE domain layanan SPBE		
			OC1.1.1 Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah		OC1.1.1 Persentase masyarakat yang mengakses dan terlibat terhadap penyebaran informasi publik Pemerintah Daerah	PROG 1 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	
				OT1.1.1.1 masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	OT1.1.1.Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	KEG 1.1 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
						SUBKEG 1.1.1. Relasi Media	
						SUBKEG 1.1.2 Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	
						SUBKEG 1.1.3 Pelayanan Informasi Publik SUBKEG 1.1.4 Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	
						SUBKEG 1.1.5 Diseminasi Informasi	
						SUBKEG 1.1.6 Pengelolaan Media Komunikasi Publik	

			OC1.1.2 Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika		OC.1.1.2 Nilai IPD aspek Layanan Digital / Indeks SPBE aspek Tatakelola	PROG 1 Pengelolaan aplikasi informatika	
				OT1.1.1.2 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	OT1.1.2.1 Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	KEG 1.1 Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					OT1.1.2.2 Persentase RT dengan akses internet (IUP)	SUBKEG 1.1.1. Koordinasi Pelaksanaan Manajemen SPBE	
						SUBKEG 1.1.2. Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	
						SUBKEG 1.1.3 Fasilitasi Penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	
						SUBKEG 1.1.4. Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	
						SUBKEG 1.1.5. Penyelenggaraan Pusat Kendali Pemerintah Daerah	
						SUBKEG 1.1.6. Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan	
						SUBKEG 1.1.7. Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	
		S1.2 Terwujudnya layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan			S1.2 Indeks Pembangunan Statistik (IPS)		
			OC1.2.1 Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)		OC1.2.1 Persentase Perangkat Daerah dengan SSD yang akurat dan diandalkan	PROG 1 Penyelenggaraan Statistik Sektor	

				OT1.1.2.1 organisasi perangkat daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	OT1.2.1 Persentase organisasi perangkat daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	KEG 1.1 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
						SUBKEG 1.1.1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	
						SUBKEG 1.1.2. Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral sesuai standar	
		S1.3 Meningkatnya keamanan informasi			S1.3 Indeks Pemerintah Digital domain keamanan siber		
			OC1.3.1 Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah		OC1.3.1 Tingkat keamanan Informasi Pemerintah Daerah	PROG 1 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	
				OT1.1.3.1 Indeks Keamanan Informasi	OT1.3.1 Tingkat keamanan informasi pemerintah	KEG 1.1 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
						SUBKEG 1.1.1. Subkegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	
						SUBKEG 1.1.2. Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	

Tabel 4.1.2
Rumusan Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 Perkiraan Maju Tahun 2027 Kabupaten Kudus

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						13.175.335.100,00							21.308.609.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						12.952.468.100,00							21.308.609.000,00	
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						12.787.352.100,00							21.094.484.000,00	
1.	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Kominfo)	-			44 Nilai	8.164.822.252,00						-	18.889.767.000,00	
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian kinerja sub kegiatan Perangkat Daerah	-			100 persen	11.604.000,00			-	-	Semua Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika	-	1.955.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				14 Dokumen	8.424.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Semua Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika		1.100.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	795.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Semua Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika		855.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	2.385.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Semua Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA	-			100 persen	4.940.949.000,00			-	-	Semua Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika	-	4.195.744.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				34 Orang/bulan	4.857.954.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Semua Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika		4.075.744.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	73.980.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Semua Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika		100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	26.400.600,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintah an dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 7. Tata Kelola Pem erintahan yang Lincih dan Adaptif	Semua Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika		35.362.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				7 Paket	8.604.500,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintah an dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 7. Tata Kelola Pem erintahan yang Lincih dan Adaptif	Semua Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika		20.162.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12.960.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintah an dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 7. Tata Kelola Pem erintahan yang Linc	Semua Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika		10.800.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	141.006.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintah an dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 7. Tata Kelola Pem erintahan yang Linc	Semua Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika		141.046.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGK AT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan	-			100 persen	14.705.000,00			-	Penguatan tata kelola pemerintah an dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 7. Tata Kelola Pem erintahan yang Linc	Semua Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika	-	15.860.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				11 Unit	14.705.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintah an dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 7. Tata Kelola Pem erintahan yang Linc	Semua Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika		15.860.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	-			100 persen	2.234.174.900,00			-	Penguatan tata kelola pemerintah an dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 7. Tata Kelola Pem erintahan yang Linc	Semua Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika	-	4.109.134.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4.000.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintah an dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 7. Tata Kelola Pem erintahan yang Linc	Semua Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika		3.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

		2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	1.672.414.900,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintah an dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 7. Tata Kelola Pem erintahan yang Lincah dan Adaptif	Semua Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika		4.105.634.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				28 Laporan	557.760.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintah an dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 7. Tata Kelola Pem erintahan yang Lincah dan Adaptif	Semua Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	-			100 persen	263.386.000,00			-	Penguatan tata kelola pemerintah an dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 7. Tata Kelola Pem erintahan yang Lincah dan Adaptif	Semua Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika	-	420.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dbayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	228.920.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintah an dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 7. Tata Kelola Pem erintahan yang Lincah dan Adaptif	Semua Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika		370.821.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERAN GKAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase khalayak yang terpapar informasi publik				100 Persentase	1.970.656.200,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angsan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan tata kelola pemerintah an dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 7. Tata Kelola Pem erintahan yang Linc ah dan Adaptif	Semua Masyarakat Kabupaten Kudus		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik														
			Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis				2 Media	1.061.669.088,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angsan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan tata kelola pemerintah an dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 7. Tata Kelola Pem erintahan yang Linc ah dan Adaptif	Semua Masyarakat Kabupaten Kudus		505.390.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3.	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Nilai IPD aspek Layanan Digital Indeks SPBE aspek Tatakelola	-			0.10 nilai 4.88 indeks	945.428.560,00						-	1.188.127.000,00	

[illegible]

			Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali				1 Laporan	95.016.800,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angsan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan tata kelola pemerintah an dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 7. Tata Kelola Pem erintahan yang Lincah dan Adaptif	Semua Perangkat Daerah Kabupaten Kudus		150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0034	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan														
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah				2 Aplikasi	18.591.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angsan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan tata kelola pemerintah an dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 7. Tata Kelola Pem erintahan yang Lincah dan Adaptif	Semua Perangka t Daerah Kabupate n Kudus		30.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0038	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas														
			Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas				1 Dokumen	8.370.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angsan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan tata kelola pemerintah an dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 7. Tata Kelola Pem erintahan yang Lincah dan Adaptif	Semua Perangka t Daerah Kabupate n Kudus		10.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						69.222.000,00							155.075.000,00	
1.	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Perangkat Daerah dengan SSD yang akurat dan diandalkan	-			93 Persentase	69.222.000,00						-	155.075.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase organisasi perangkat daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	-			100 Persentase	69.222.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Penguatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 7. Tata Kelola Pemerintahan yang Lincih dan Adaptif	Semua Perangkat Daerah Kabupaten Kudus	-	155.075.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0020	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral														
			Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik				180 Orang	36.304.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Penguatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 7. Tata Kelola Pemerintahan yang Lincih dan Adaptif	Semua Perangkat Daerah Kabupaten Kudus		55.075.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0021	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar														
			Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral				100 %	32.918.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Penguatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 7. Tata Kelola Pemerintahan yang Lincih dan Adaptif	Semua Perangkat Daerah Kabupaten Kudus		100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						95.894.000,00							59.050.000,00	
1.	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat keamanan informasi Pemerintah Daerah	-			55,56 Persentase	95.894.000,00						-	59.050.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat keamanan informasi pemerintah	-			510 indeks	95.894.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 7. Tata Kelola Pemerintahan yang Lincah dan Adaptif	Semua Perangkat Daerah Kabupaten Kudus	-	59.050.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.0007	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian				8 Perangkat Daerah	16.452.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 7. Tata Kelola Pemerintahan yang Lincah dan Adaptif	Semua Perangkat Daerah Kabupaten Kudus		39.050.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.0008	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah														

			Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian				1 Dokumen	79.442.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 7. Tata Kelola Pemerintahan yang Lincah dan Adaptif	Semua Perangkat Daerah Kabupaten Kudus		20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	X	NON URUSAN						222.867.000,00							0,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						222.867.000,00							0,00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Kominfo)	-			44 Nilai	222.867.000,00						-	0,00	
	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan	-			100 persen	222.867.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				17 Unit	222.867.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	J U M L A H							13.175.335.100,00							21.308.609.000,00	

4.2 Manajemen Risiko Perangkat Daerah Tahun 2026

Sesuai Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 700.1/3726/2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tahapan Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, bahwa proses penilaian risiko simultan dengan penyusunan perencanaan dan penganggaran. Berkaitan dengan hal tersebut maka, perangkat daerah melakukan penilaian risiko strategis dan operasional sebagaimana kertas kerja yang ada. Setelah dilakukan penilaian, maka hanya risiko kategori sangat tinggi dan tinggi yang perlu dirumuskan rencana tindak pengendaliannya (RTP). Perumusan RTP memperhatikan rancangan program, kegiatan, subkegiatan dan aktivitas yang akan dilaksanakan pada tahun 2026, karena pada dasarnya pelaksanaan program, kegiatan, subkegiatan dan aktivitas yang akan dilakukan merupakan upaya menyelesaikan masalah dan dalam konteks manajemen risiko merupakan upaya memitigasi agar risiko yang diidentifikasi tidak terjadi. Hasil penilaian risiko dan RTP dituangkan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 4.2.1 Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Strategis Perangkat Daerah (Dinas Komunikasi dan Informatika) Tahun 2025-2029

No	Tujuan/Sasaran Strategis/ Outcome	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungk inan	Nilai Risiko	Rencana Tindak Pengendalian
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Tujuan: Terwujudnya transformasi layanan publik berbasis digital	Indeks Pemerintahan Digital / Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)												
	Sasaran I : Meningkatnya Informasi dan komukinasi layanan publik berbasis digital	Indeks Pemerintahan Digital Domain kepuasan pengguna layanan digital pemerintah/Indeks SPBE domain layanan SPBE												
			Gangguan teknis pada layanan publik berbasis elektronik		Dinas Kominfo/Pusat Kendali Pemerintah Daerah	infrastruktur yang kurang memadai, belum adanya pemantauan secara real time	Internal	C	Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital pemerintah	masyarakat pengguna layanan publik berbasis elektronik	3	2	6	Penguatan infrastruktur TI, implementasi sistem monitoring 24/7
			Interoperabilitas antar sistem		OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus	Sistem aplikasi tidak terintegrasi, menimbulkan duplikasi data	Eksternal	C	Duplikasi data, proses birokrasi lambat, dan pengambilan keputusan tidak akurat	Pengguna sistem pemerintahan berbasis elektronik	2	3	6	Penetapan dan sosialisasi standar interoperabilitas yang ditetapkan secara nasional, percepatan penerapan arsitektur SPBE
			Lambatnya Tanggapan atas Keluhan		Dinas Kominfo	Sistem pengaduan tidak responsif, atau tidak ada mekanisme umpan balik yang efektif	Internal	C	Menurunnya kepuasan masyarakat akan layanan publik	Pemda, Masyarakat	3	3	9	1. Menyediakan layanan respons cepat (chatbot/CS online). 2. Menyusun dan mensosialisasikan SOP waktu tanggap keluhan (misal: max 2x24 jam). 3. Memberikan pelatihan kepada petugas layanan publik. 4. Melakukan Evaluasi bulanan terhadap penyelesaian keluhan. 5. Menyediakan fitur feedback setelah keluhan ditangani
	Sasaran 2 : statistik yang akurat dan dapat diandalkan	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Metadata tidak tersedia atau tidak sesuai standar BPS		produsen data	Kurangnya pemahaman produsen data terkait metadata statistik	Internal	C	Pengguna tidak memahami konteks data	Pengguna data	2	2	4	Pelatihan penyusunan metadata statistik
			Kesesuaian Kode Referensi dan Variabel		pembina data	Tidak tersedia kode referensi terbaru	Eksternal	C	Integrasi data sektoral terganggu	Pengguna data	2	3	6	Pemutakhiran kode referensi, integrasi dengan portal Satu Data Indonesia
			Data tidak diperbarui secara berkala		produsen data	Belum ada jadwal pemutakhiran data	Internal	C	Menurunnya kredibilitas data statistik sektoral	Pengguna data	2	2	4	validasi data, melakukan audit kualitas data secara berkala
	Sasaran 3 : Meningkatkan keamanan informasi	Indeks Pemerintah Digital domain keamanan siber												
			keamanan siber dan perlindungan data pribadi		Dinas Kominfo/Pusat Kendali Pemerintah Daerah	Terjadi kebocoran atau peretasan data pengguna layanan digital pemerintah	Internal	C	Kerugian reputasi, kehilangan kepercayaan publik, potensi sanksi hukum	Pengguna sistem pemerintahan berbasis elektronik	2	3	6	Audit keamanan dilaksanakan secara rutin, penerapan firewall dan enkripsi, pelatihan keamanan siber untuk pegawai

Tabel 4.2.2 Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Operasional Perangkat Daerah (Dinas Komunikasi dan Informatika) Tahun 2026

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko	Rencana Tindak Pengendalian
		Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena				
PROGRAM : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota													
Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)												
Penyusunan Dokumen Perencanaan	Dokumen Perencanaan yang tersusun sesuai dengan aturan	Dokumen Perencanaan tidak sinkron			Ketidaksesuaian antara dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan tingkat nasional, provinsi, maupun antar perangkat daerah	Internal	C	Program/kegiatan tumpang tindih atau tidak sesuai arah kebijakan pemerintah pusat/daerah	Pemkab Kudus, masyarakat	2	2	4	dilakukan verifikasi Dokumen Perencanaan agar sesuai dengan perencanaan tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional secara berjenjang dari Kasubbag PEP & Keuangan , Kepala Bidang , Sekretaris dan Kepala Dinas
		Dokumen perencanaan tidak berbasis Data dan Informasi			Data sektoral yang tidak lengkap, tidak akurat, tidak terbaru, atau tidak terintegrasi	Internal	C	Analisis tidak valid, sasaran tidak tepat, dan target tidak realistis, Rencana jadi tidak objektif, terlalu mengakomodasi kepentingan jangka pendek	Pemkab Kudus, masyarakat	2	2	4	perencanaan harus menggunakan data yang diambil dari satu data
					Intervensi politik dalam penentuan prioritas program/kegiatan								
		Keterlambatan Penyusunan Dokumen Perencanaan			proses internal, koordinasi lemah, atau pergantian personel	Internal	C	Tidak sinkron dengan siklus perencanaan dan penganggaran daerah (RKPD, KUA-PPAS, APBD)	Pemkab Kudus, masyarakat	2	2	4	Pengembangan SDM yang menangani perencanaan
					Kurangnya pemahaman atau kemampuan teknis aparatur perencana dalam menyusun dokumen perencanaan berbasis kinerja dan anggaran								
		Tidak konsistennya antar Dokumen Perencanaan			Isi dokumen perencanaan tidak konsisten antar tingkat (misal antara Renstra dan Renja) atau antara perencanaan dan penganggaran	Internal	C	Sulit mengukur kinerja karena target berubah-ubah atau tidak tercermin dalam APBD	Pemkab Kudus, masyarakat	2	2	4	dilakukan verifikasi Dokumen Perencanaan sesuai dengan Renstra secara berjenjang dari Kasubbag PEP & Keuangan , Kepala Bidang , Sekretaris dan Kepala Dinas
Sub Kegiatan : Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (laporan)												
Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sesuai dengan aturan	Keterlambatan Penyampaian Laporan			Laporan disusun tidak tepat waktu karena koordinasi yang lemah atau kesibukan OPD	Internal	C	Menghambat proses evaluasi tingkat kabupaten/kota	Dinas Kominfo	1	3	3	
		Ketidakterukuran Capaian Kinerja			Indikator tidak SMART (Spesifik, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound)	Internal	C	Sulit untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan suatu program/kegiatan	Dinas Kominfo	1	3	3	
					Data tidak tersedia, tidak akurat, atau tidak sesuai periode pelaporan								
		Manipulasi atau Rekayasa Data			Data kinerja dimanipulasi agar terlihat baik	Internal	C	Menyesatkan pengambilan kebijakan, menurunkan kepercayaan publik	Dinas Kominfo	1	3	3	
		Kurangnya Evaluasi Terhadap Hasil (Outcome)			Laporan lebih fokus pada output kegiatan (jumlah pelatihan, gedung, dsb), bukan pada dampaknya bagi masyarakat	Internal	C	Capaian strategis (tujuan/sasaran Renstra) tidak terukur.	Dinas Kominfo	1	3	3	

Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Data Tidak Konsisten atau Tidak Terstandar			Format, definisi, satuan, dan metodologi pengumpulan data tidak seragam antar OPD	Internal	C	Sulit dikompilasi dan diverifikasi oleh walidata utama (misalnya Bappeda/BPS)	Dinas Kominfo	1	3	3	
		Tidak Adanya Metadata			Data disajikan tanpa informasi teknis seperti sumber data, metode pengumpulan, frekuensi, dan satuan	Internal	C	Menyulitkan interpretasi dan validasi data	Dinas Kominfo	1	3	3	
		Risiko Duplikasi atau Overlapping Data			Beberapa OPD melaporkan data yang sama tanpa koordinasi	Internal	C	Kebingungan dalam penentuan sumber data resmi	Dinas Kominfo	1	3	3	
Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													
Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)												
Pencairan gaji dan tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASN yang diberikan	Ketidaksesuaian Data ASN dengan Realitas Lapangan			Jumlah ASN dalam daftar gaji tidak mencerminkan pegawai yang aktif bekerja (ada yang sudah pensiun, meninggal, atau mutasi)	Internal	C	Terjadi pemborosan anggaran atau pembayaran gaji kepada pegawai fiktif	Dinas Kominfo	1	3	3	
		Data Tidak Sinkron antar Sistem (SIASN, SIMPEG, SIPD, Gaji)			Sistem kepegawaian dan sistem penggajian tidak terintegrasi dengan baik	Internal	C	Timbul perbedaan jumlah antara data kepegawaian dan realisasi pembayaran gaji	Dinas Kominfo	1	3	3	
		Kekeliruan dalam Klasifikasi Tunjangan			Tunjangan tertentu (seperti tunjangan jabatan atau kinerja) diberikan tanpa dasar hukum atau SK.	Internal	C	Pembayaran tidak sah, menimbulkan temuan audit	Dinas Kominfo	1	3	3	
Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dokumen)												
Pemberian honor bagi Pejabat Pelaksana Kegiatan	Honor Pejabat Pelaksana Kegiatan yang diberikan	Ketidaksesuaian Dokumen dengan Tugas Jabatan			Dokumen yang disusun tidak mencerminkan tugas pokok dan fungsi ASN yang bersangkutan	Internal	C	Laporan tidak relevan untuk penilaian kinerja atau kenaikan pangkat	Dinas Kominfo	1	3	3	
		Ketidaksesuaian Jumlah Dokumen dengan Jumlah Kegiatan			Jumlah dokumen yang tercatat tidak sesuai dengan aktivitas/tugas ASN yang sebenarnya	Internal	C	Penilaian kinerja dan pengelolaan administrasi menjadi tidak valid	Dinas Kominfo	1	3	3	
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (dokumen)												
Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan SKPD	Dokumen administrasi Keuangan SKPD	Dokumen Tidak Tepat Waktu			Dokumen penatausahaan dan verifikasi disusun atau disampaikan melewati batas waktu yang ditentukan	Internal	C	Keterlambatan dalam pelaporan keuangan dan penyusunan LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah)	Dinas Kominfo	1	3	3	
		Verifikasi Tidak Dilakukan Secara Menyeluruh			Penguji atau verifikator tidak memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen secara menyeluruh	Internal	C	Potensi pembayaran ganda, kesalahan bayar, atau pengeluaran tidak sah	Dinas Kominfo	1	3	3	
		Pemalsuan atau Manipulasi Dokumen			Pembuatan atau penggunaan dokumen palsu untuk kepentingan pribadi	Internal	C	Tindak pidana korupsi, temuan BPK, dan sanksi hukum	Dinas Kominfo	1	3	3	

Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang dikelola sesuai standar manajemen aset												
Sub Kegiatan : Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD												
Asuransi Kebakaran Radio Suara Kudus; Dinas Kominfo	Terlaksananya Asuransi Kebakaran Radio Suara Kudus sesuai ketentuan	Terjadi Kerugian Finansial Total karena Tanpa asuransi, Radio Suara Kudus harus menanggung seluruh biaya perbaikan atau pembangunan kembali jika terjadi musibah, kerusakan, atau kebakaran			ketidakpatuhan terhadap kewajiban sebagai pemegang polis (misalnya, pembayaran premi) atau kurangnya pemahaman dan ketelitian dalam memenuhi syarat dan prosedur yang telah disepakati dalam polis asuransi	Internal	C	tidak terlaksananya asuransi kebakaran sesuai ketentuan akan membuat Radio Suara Kudus rentan terhadap kehancuran total jika terjadi musibah, baik dampak finansial, operasional maupun reputasi	Pemda	3	3	6	Peningkatan pemahaman dan kesadaran betapa pentingnya asuransi, Merencanakan Anggaran yang Memadai
Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN PD yang memenuhi 20 JP setahun												
Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan												
Pelatihan Pegawai ASN dan Non ASN	Terlaksananya Pelatihan Pegawai ASN dan Non ASN	Penurunan Kualitas dan Kompetensi Pegawai, menurunnya produktivitas pegawai, Pegawai kesulitan beradaptasi terhadap perubahan			Anggaran/Dana yang Tidak Mencukupi, Keterbatasan Sumber Daya Manusia, Tidak Adanya Analisis Kebutuhan Pelatihan, Jadwal yang Tumpang Tindih atau Sulit Disepakati, Minat Pegawai yang Rendah	Internal	C	Karir terhambat, Kesenjangan Keterampilan Antar Pegawai, Peningkatan Beban Kerja pada Pegawai yang Kompeten, Tidak Tercapainya Tujuan dan Sasaran serta visi dan misi instansi, menurunnya kualitas pelayanan publik	Pemda	3	3	6	Dalam perencanaan penganggaran harus sesuai dengan analisis kebutuhan pelatihan, Perencanaan Jadwal pelatihan yang Fleksibel dan Terintegrasi, Penguatan Komitmen dan Dukungan Pimpinan
Sub Kegiatan : Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan												
Sosialisasi Tatap Muka Gempur Rokok Ilegal	Terlaksananya Sosialisasi Tatap Muka Gempur Rokok Ilegal	Kurangnya Pemahaman Masyarakat terhadap ciri rokok ilegal, bahaya rokok ilegal, sanksi hukum, dampak ekonomi dan sosial			Keterbatasan Anggaran dan Sumber Daya, kurangnya koordinasi yang efektif antar instansi terkait (Bea Cukai, Pemerintah Daerah, Kepolisian, TNI, dan instansi lain), Sosialisasi dengan metode yang itu-itu saja tanpa adanya inovasi, bisa jadi minat masyarakat untuk hadir atau menyimak menjadi rendah	Internal/Eksternal	C	Peredaran Rokok Ilegal Tetap Tinggi, Merugikan Penerimaan Negara, Rendahnya Tingkat Pelaporan karena kurang pahamnya masyarakat, persaingan tidak sehat bagi rokok yang legal	Pemda, Masyarakat	3	3	6	Pemanfaatan Media Sosial Lokal untuk mengkampanyekan, Kerja Sama dengan Influencer Lokal,Peningkatan Partisipasi Komunitas dan Stakeholder Lokal, mengoptimalkan peran serta aparat di tingkat desa untuk memastikan pesan Gempur Rokok Ilegal tetap tersampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat

Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan pendukung perkantoran yang sesuai standar												
Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan												
Pembelian Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Pembelian Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Keterlambatan Pekerjaan, Kualitas Hasil Kerja Menurun			Keterbatasan Anggaran, Pemotongan Anggaran Mendadak, Kenaikan Harga Mendadak	Internal	C	Layanan Lambat dan Tidak Efisien, Hambatan dalam Akuntabilitas dan Transparansi, Penurunan Motivasi dan Kinerja ASN	Pemda, Masyarakat	3	3	6	Penyusunan Rencana Kebutuhan Jangka Menengah dan Panjang, penyediaan Anggaran sesuai dengan Kebutuhan
Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan												
Pembelian dan penyediaan logistik kantor	Terlaksananya Pembelian dan penyediaan logistik kantor	Penurunan Produktivitas dan Konsentrasi Pegawai dalam bekerja, Rasa Tidak Dihargai karena logistik untuk menunjang dan fasilitas untuk pegawai			Perencanaan Anggaran yang kurang baik, Tidak Ada Perencanaan Kebutuhan, Perubahan Harga yang Tidak Terduga	Internal	C	Pekerjaan terhambat, penurunan motivasi kerja pegawai	Pemda, Masyarakat	3	3	6	penyediaan Anggaran sesuai dengan Kebutuhan, menerapkan sistem manajemen logistik yang lebih baik, meningkatkan komunikasi antar bidang, dan melakukan perencanaan yang matang
Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan												
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan untuk kebutuhan kantor	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan untuk kebutuhan kantor	Pekerjaan tertunda, produktivitas pegawai menurun			Perencanaan Anggaran yang kurang baik, Tidak Ada Perencanaan Kebutuhan, Perubahan Harga yang Tidak Terduga	Internal	C	Pekerjaan terhambat, penurunan motivasi kerja pegawai	Pemda, Masyarakat	3	3	6	Penyediaan Anggaran sesuai dengan Kebutuhan
Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan												
Pembelian Surat Kabar Lokal	Terlaksananya Pembelian Surat Kabar Lokal	Ketinggalan berita lokal, Kurangnya Sumber Referensi			Perencanaan Anggaran yang kurang baik	Internal	C	Kehilangan Informasi dan Wawasan Penting, Pengambilan Keputusan yang Kurang Tepat karena minimnya informasi	Pemda, Masyarakat	3	3	6	Penyediaan Anggaran sesuai dengan Kebutuhan

Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
Belanja perjalanan dinas biasa, luar kota dan dalam kota	Terlaksananya Belanja perjalanan dinas biasa, luar kota dan dalam kota	Terhambatnya Koordinasi Antar Pemerintah, Kesenjangan Kompetensi bagi ASN yang tidak bisa mengikuti pelatihan di luar kota			Keterbatasan Anggaran, Pemotongan Anggaran Mendadak	Internal	C	Kualitas Pelayanan Menurun, Data dan Informasi yang Tidak Akurat, Melemahnya Koordinasi dan Sinergi Antar Pemerintah	Pemda, Masyarakat	3	3	6	Penyediaan Anggaran sesuai dengan Kebutuhan
Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan												
Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan												
Belanja Pengadaan Mebel	Terlaksananya Belanja Pengadaan Mebel	kualitas pelayanan publik menurun, Kesejahteraan dan Kinerja Pegawai menurun			Keterbatasan Anggaran, Pemotongan Anggaran Mendadak	Internal	C	Pekerjaan terhambat, penurunan motivasi kerja pegawai	Pemda, Masyarakat	3	3	6	Penyediaan Anggaran sesuai dengan Kebutuhan
Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan												
Belanja Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Belanja Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Penurunan Produktivitas dan Konsentrasi Pegawai dalam bekerja, Rasa Tidak Dihargai, lingkungan tempat kerja menjadi tidak nyaman			Keterbatasan Anggaran, Pemotongan Anggaran Mendadak	Internal	C	Penurunan Citra dan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pelayanan pemerintah, Pekerjaan terhambat, penurunan motivasi kerja pegawai	Pemda, Masyarakat	3	3	6	Penyediaan Anggaran sesuai dengan Kebutuhan
Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu												
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat												
Belanja pengiriman surat/paket	Terlaksananya Belanja pengiriman surat/paket	Dokumen penting/kontrak tidak dapat sampai, pekerjaan tertunda			Keterbatasan Anggaran, Pemotongan Anggaran Mendadak	Internal	C	menurunnya kepercayaan terhadap pemerintah	Pemda, Masyarakat	3	3	6	Penyediaan Anggaran sesuai dengan Kebutuhan
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan												
Pembayaran tagihan rutin tiap bulan dan tahun, tagihan listrik, telepon, internet bandwidth dan lisensi	Terlaksananya Pembayaran tagihan rutin tiap bulan dan tahun, tagihan listrik, telepon, internet bandwidth dan lisensi	Denda dan pembiayaan tambahan, pemutusan layanan			Perencanaan anggaran kurang matang, SDM kurang kompeten dalam menangani pembayaran tagihan sehingga terjadi keterlambatan	Internal	C	Pekerjaan terhambat, produktivitas pegawai menurun, kualitas pelayanan publik menurun	Pemda, Masyarakat	3	3	6	Penyediaan Anggaran sesuai dengan Kebutuhan, Prioritaskan Tagihan, gunakan fitur pengingat, Pegawai harus disiplin dan cermat dalam melaksanakan pembayaran agar tidak terlambat

[illegible]

Sub Kegiatan : Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media											0	
Kunjungan Pers	Kunjungan pers terlaksana sesuai ketentuan	Media tidak hadir sesuai undangan yang dikirim			Konfirmasi kedatangan tidak direspons atau berbenturan dengan agenda lain	Eksternal	UC	Cakupan publikasi tidak optimal	Pemda	2	4	8	Melakukan Follow-up kehadiran H-3 dan H-1, Menyiapkan media alternatif/cadangan
		Ketidaksiapan teknis saat kunjungan pers			Koordinasi teknis kurang matang	Internal	C	Kegiatan kunjungan pers terganggu	Pemda, Wartawan	3	2	6	Melakukan Ceklist teknis seminggu sebelumnya,
		Lokasi kunjungan tidak representatif atau tidak siap dikunjungi			Koordinasi lemah dengan instansi tujuan, tidak ada survei awal	Internal	C	Menciptakan kesan negatif pada media, informasi tidak tersampaikan optimal	Media, Pemkab, mitra lokasi kunjungan	4	2	8	Melakukan survei lokasi, Melaksanakan koordinasi intensif dengan pihak terkait, Mempersiapkan teknis yang matang
		Keterbatasan anggaran operasional kegiatan			Perencanaan tidak detail, biaya melebihi estimasi awal	Internal	C	Kegiatan kurang maksimal, pengurangan peserta/media yang diundang	Internal Kominfo, media	3	3	9	Menyusun RAB secara realistis, Mengalokasikan cadangan dana, Mengefisiensi anggaran non-prioritas
Jumpa Pers	Kegiatan jumpa pers terlaksana sesuai ketentuan	Informasi yang disampaikan menimbulkan interpretasi berbeda di masyarakat			Penyampaian pesan tidak disusun dengan strategi komunikasi yang baik	Internal	C	Terjadi mispersepsi publik; berkurangnya kepercayaan terhadap pemerintah daerah	Pemda, Masyarakat	4	3	12	Menyusun materi pokok secara ringkas dan akurat; Melakukan pengarahannya narasumber sebelum acara.
		Media utama tidak hadir			Undangan kurang masif; jadwal tidak dikomunikasikan sejak awal	Internal	C	Cakupan pemberitaan jadi sempit; informasi tidak tersampaikan ke publik secara luas	Media, publik pengguna informasi	3	3	9	Memperbarui database media; menjalin komunikasi intensif dengan media
		Komentar negatif publik pasca-jumpa pers			Topik sensitif, atau tidak sesuai ekspektasi publik	Eksternal	UC	Menurunnya kepercayaan; disinformasi berkembang di medsos	Pemda, Masyarakat	3	3	9	Melakukan issue mapping sebelum jumpa pers. Menyiapkan pernyataan penyeimbang atau klarifikasi.
		Jadwal jumpa pers tidak sesuai waktu ideal bagi media			Tidak melibatkan masukan media dalam penjadwalan	Internal	C	Minim partisipasi media; pemberitaan tertunda	Pemda, Wartawan, Masyarakat	3	2	6	Lakukan koordinasi waktu lintas agenda daerah; kirim undangan resmi jauh hari.
		Tempat atau fasilitas jumpa pers tidak memadai			Tidak survei lokasi, sound system kurang baik, pencahayaan buruk	Internal	C	Mengganggu kenyamanan, mengurangi kualitas dokumentasi dan siaran	Media, Kominfo, peserta	3	3	9	Melakukan Survei lokasi terlebih dahulu, Melakukan pengecekan teknis (audio, visual), Menyiapkan alternatif
												0	
Sub Kegiatan : Kemitraan Komunikasi dengan Kelompok Informasi Masyarakat	Jumlah KIM yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo											0	
FK Metra/KIM	Kegiatan FK Metra/KIM terlaksana sesuai ketentuan	Pesan komunikasi pembangunan tidak tersampaikan secara utuh kepada masyarakat			FK Metra/KIM belum memahami substansi pesan secara menyeluruh	Internal	C	Masyarakat salah menangkap pesan	Pemda, Masyarakat	3	3	9	Melakukan pelatihan konten dan pengarahannya FK Metra/KIM secara berkala
		Rendahnya partisipasi masyarakat terhadap media tradisional			Perubahan preferensi ke media digital	Eksternal	UC	Pesan tidak sampai sasaran; FK Metra/KIM dipandang tidak relevan	Pemda, Masyarakat	4	3	12	Menggabungkan pertunjukan FK Metra/KIM dengan promosi medsos lokal; kolaborasi lintas platform.
		Koordinasi antar stakeholder (KIM, desa, fasilitator) tidak berjalan lancar			Peran fasilitator lemah atau KIM tidak aktif	Internal	C	Kegiatan tidak efektif; FK Metra/KIM kurang sinergis	Pemda, Masyarakat, Pelaku KIM	3	3	9	Melibatkan Camat atau tokoh desa sebagai mitra koordinatif aktif; Membuat kalender kegiatan bersama.

Sub Kegiatan : Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai Peraturan Perundang-undangan												
Pelayanan Permohonan Informasi Publik	Kegiatan Pelayanan Permohonan Informasi Publik terlaksana sesuai ketentuan	Informasi yang diberikan tidak akurat atau tidak terkini			Update data dari OPD belum tersedia atau lambat	Internal	C	Menurunnya kepercayaan publik terhadap layanan informasi	Pemohon, OPD, masyarakat	4	3	12	Menetapkan SOP pemutakhiran informasi; melakukan koordinasi berkala dengan OPD sebagai pemilik data.
		Permohonan informasi publik tidak ditanggapi tepat waktu			Keterbatasan SDM atau beban kerja tinggi; sistem permohonan tidak digital	Internal	C	Pelayanan dianggap lamban; potensi sengketa informasi	Pemohon, Dinas Kominfo	4	4	16	Menggunakan sistem digital tracking; Meningkatkan kapasitas SDM pengelola PPID.
		Pemohon tidak puas terhadap hasil informasi yang diberikan			Perbedaan ekspektasi pemohon dengan ketentuan informasi terbuka	Eksternal	UC	Potensi sengketa informasi ke Komisi Informasi; konflik antara publik dan institusi	Pemohon, Dinas Kominfo, KI Jateng	3	3	9	Menyediakan penjelasan rinci atas klasifikasi informasi; Memasilitasi mediasi atau klarifikasi jika diperlukan.
		Informasi yang bersifat dikecualikan justru diberikan			Kurangnya pemahaman petugas terhadap informasi yang dikecualikan	Internal	C	Potensi kebocoran informasi rahasia; ancaman hukum atau etika	Pemerintah daerah, pihak ketiga, masyarakat	5	2	10	Menerapkan SOP verifikasi & klasifikasi; melatih petugas PPID secara rutin sesuai ketentuan perundanga-undangan
		Penyalahgunaan informasi publik oleh pihak pemohon			Informasi dimanfaatkan untuk menyebar hoaks, provokasi, atau kepentingan komersial pribadi	Eksternal	UC	Reputasi pemerintah terganggu; muncul opini negatif publik	Pemda, masyarakat	4	2	8	Menambahkan disclaimer pada informasi sensitif; mengaktifkan kanal klarifikasi dan monitoring pasca permohonan.
		Terjadi lonjakan permintaan informasi pada waktu bersamaan			Isu viral, isu sensitif	Eksternal	UC	SDM kewalahan; keterlambatan layanan	Petugas PPID, masyarakat	3	4	12	Memprioritaskan berdasarkan urgensi; menggunakan sistem antrian berbasis tanggal permohonan.
		Petugas pelayanan tidak responsif terhadap pemohon			Sikap tidak profesional, kurang pelatihan pelayanan publik	Internal	C	Kepuasan publik menurun, laporan ke KI, pencitraan buruk terhadap PPID	Pemohon, Kominfo	3	4	12	Pelatihan etika pelayanan, monitoring kepuasan layanan, supervisi langsung oleh atasan
												0	
Bimtek PPID	Kegiatan Bimtek PPID terlaksana sesuai ketentuan	Ketidakhadiran peserta Bimtek/PPID Pelaksana			Kurangnya koordinasi dan komitmen OPD, jadwal bentrok	Internal/Eksternal	C	Tujuan peningkatan kapasitas tidak tercapai	PPID Pelaksana, Kominfo	3	3	9	Penjadwalan jauh hari dan melakukan koordinasi intensif dengan tiap OPD.
		Narasumber berhalangan hadir mendadak			Kendala pribadi atau teknis	Eksternal	UC	Gangguan pada jadwal acara; penundaan atau perubahan mendadak	Panitia, peserta Bimtek	2	4	8	Menyiapkan narasumber cadangan; fleksibilitas waktu pada agenda.
		Gangguan teknis saat pelaksanaan (jika daring atau hybrid)			Koneksi internet buruk, peralatan tidak siap	Eksternal	UC	Pelatihan terganggu; peserta kehilangan poin penting	Peserta Bimtek, narasumber	3	3	9	Melakukan simulasi teknis sebelum pelaksanaan; Menyiapkan dokumentasi materi untuk peserta.
		Peserta tidak memahami materi karena metode penyampaian kurang komunikatif			Narasumber terlalu teoritis; tidak interaktif	Internal	C	Pemahaman rendah; penerapan informasi publik tidak membaik	PPID Pelaksana, Kominfo	3	2	6	Melakukan Seleksi narasumber dengan pendekatan komunikatif; Menyisipkan sesi diskusi dan praktik langsung.
		Evaluasi pasca-bimtek tidak dilakukan sehingga tidak diketahui dampaknya			Tidak ada instrumen penilaian; tidak dilanjutkan dengan monitoring	Internal	C	Tidak ada tindak lanjut; pembelajaran tidak berkembang	PPID Pelaksana, Kominfo	2	4	8	Mewajibkan evaluasi dan follow-up implementasi pasca Bimtek.
		Kegiatan tidak berdampak pada peningkatan kualitas layanan informasi publik oleh PPID Pelaksana			Tidak ada aksi nyata pasca pelatihan; peserta tidak menerapkan hasil bimtek	Eksternal	UC	Pelayanan informasi publik tetap stagnan di OPD	Pemda, masyarakat	4	3	12	Melakukan monitoring berkala; mendorong komitmen pimpinan OPD untuk follow-up hasil bimtek.

Monev PPID	Kegiatan Monev PPID terlaksana sesuai ketentuan	OPD tidak menindaklanjuti temuan hasil monev			Tidak ada sanksi atau penguatan regulasi; kurangnya komitmen pimpinan OPD	Eksternal	UC	Perbaikan layanan informasi publik tidak terjadi	Pemda, masyarakat	4	3	12	Rekomendasi hasil monev ditindaklanjuti dengan surat resmi dan dilaporkan ke Sekda selaku atasan PPID.
		PPID Pelaksana tidak memahami indikator yang dinilai,			Kurangnya bimtek/pelatihan, tidak ada panduan jelas	Internal	C	Hasil monev tidak mencerminkan kondisi sesungguhnya	Kominfo, PPID Pelaksana	3	3	9	Melakukan sosialisasi indikator monev; Memberi pendampingan teknis dan petunjuk teknis yang jelas.
		OPD merasa monev PPID hanya formalitas dan tidak menimbulkan konsekuensi			Kurangnya komunikasi pentingnya monev; tidak ada insentif/sanksi	Eksternal	UC	Menurunnya motivasi dalam peningkatan pelayanan informasi	PPID Pelaksana, Masyarakat	3	2	6	Melakukan Sosialisasi hasil monev & peringkat; Mempertimbangkan insentif simbolik seperti penghargaan.
		Tidak tersusunnya instrumen monev PPID			Belum ada tim penyusun	Internal	C	kinerja PPID tidak dapat diukur dan ditingkatkan	Kominfo, PPID Pelaksana, Masyarakat	4	3	12	Membentuk tim penyusun instrumen monev; merujuk pada Permendagri, arahan KI, dan melakukan best practices.
Sub Kegiatan : Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda Komunikasi prioritas Pemerintah Daerah												
Media Monitoring Analisis	Kegiatan Media Monitoring Analisis terlaksana sesuai ketentuan	Ketidaktepatan analisis opini publik dari media			Kompetensi analis media belum memadai; keterbatasan waktu dan sumber daya	Internal	C	Pengambilan kebijakan berdasarkan opini yang bias atau tidak objektif	Kominfo, Pimpinan Daerah, Masyarakat	4	3	12	Meningkatkan kapasitas analis; Menggunakan tools analitik berbasis data; Melakukan verifikasi silang sumber berita
		Keterlambatan laporan monitoring terhadap isu strategis			Banyaknya isu yang muncul serentak; keterbatasan SDM analis media	Internal	C	Penanganan krisis komunikasi tidak responsif; Pemda dianggap lambat merespon aspirasi publik	Kepala Daerah, Masyarakat, Media	3	4	12	Menjadwalkan monitoring berkala harian dan real-time;
		Tidak tercatatnya isu penting karena media monitoring tidak menyeluruh			Jangkauan monitoring terbatas pada media mainstream; tidak menjangkau media sosial lokal	Internal	C	Terlewatnya informasi yang berpotensi menjadi krisis; kurangnya dasar kebijakan responsif	Kominfo, Pimpinan, OPD Terkait	3	3	9	Perluas kanal monitoring (termasuk medsos dan citizen journalism); kolaborasi dengan relawan digital
		Kesalahan dalam analisis sentimen atau interpretasi pemberitaan			Kurangnya pemahaman tim terhadap konteks lokal/nasional, analisis tidak objektif	Internal	C	Rekomendasi tidak tepat, bisa pengaruhi pengambilan kebijakan	Pimpinan, Publik, Media	3	4	12	Melatih SDM analisis media, libatkan ahli komunikasi atau pakar eksternal
												0	
Monev Pengaduan	Kegiatan Monev Pengaduan terlaksana sesuai ketentuan	Sistem pengaduan tidak terintegrasi antar kanal			Pengaduan masuk dari banyak pintu tanpa sistem penyatuan dan klasifikasi	Internal	C	Data tidak terpusat; duplikasi pengaduan; pengolahan informasi menjadi tidak efisien	Kominfo, OPD teknis, Masyarakat	4	3	12	Mengembangkan dashboard terintegrasi dan SOP satu pintu pemrosesan aduan
		Tidak akuratnya rekap data pengaduan masyarakat			Data dari berbagai kanal masuk tanpa sistem sinkronisasi yang baik	Internal	C	Laporan monev bias	Pimpinan, OPD teknis, Masyarakat	4	3	12	Integrasi kanal pengaduan, Menggunakan dashboard otomatis, Melakukan validasi data secara berkala
		Evaluasi hanya menjadi formalitas tanpa implementasi tindak lanjut			Tidak ada mekanisme pemantauan atas hasil evaluasi	Internal	C	Isu pengaduan berulang, penurunan kepercayaan masyarakat	Kominfo, OPD teknis, Masyarakat	3	4	12	Membuat sistem tindak lanjut wajib bagi OPD, disertai laporan realisasi dan feedback masyarakat

Sub Kegiatan : Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik												
Cetak Foto Bupati dan Wakil Bupati	Foto Bupati dan Wakil Bupati telah dicetak dan terdistribusikan dengan baik	Terlambatnya proses cetak dan distribusi foto ke OPD			Koordinasi lambat, keterlambatan dari pihak penyedia cetak	Internal	C	OPD tidak dapat memasang foto tepat waktu, persepsi publik kurang maksimal	OPD, Masyarakat umum	3	4	12	Menetapkan timeline cetak, Bekerja sama dengan percetakan terpercaya, Membuat sistem distribusi terjadwal
		Kesalahan teknis (salah nama, jabatan, atau logo) pada desain foto			Kurangnya verifikasi desain akhir, tidak adanya pengecekan berlapis	Internal	C	Kredibilitas Pemda bisa dipertanyakan, foto perlu dicetak ulang	Dinas Kominfo, Bupati/Wabup	3	3	9	SOP pemeriksaan desain oleh tim sebelum cetak
		Revisi jabatan/foto terbaru tidak segera tercetak ulang			Tidak ada pemutakhiran rutin, perubahan struktural tidak direspons cepat	Internal	C	Foto yang dipasang tidak sesuai kondisi terkini	OPD, Pengunjung Layanan Publik	2	4	8	Menjadwalkan pemutakhiran berkala dan memperbaharui file master secara sistematis
												0	
Seleksi Dirut Radio Suara Kudus	Kegiatan Seleksi Dirut Radio Suara Kudus terlaksana sesuai ketentuan	Kurangnya pelamar yang memenuhi kualifikasi			Sosialisasi terbatas, kriteria terlalu tinggi atau kurang menarik bagi calon pelamar	Internal	C	Proses seleksi terhambat atau gagal, jabatan kosong terlalu lama	Radio Suara Kudus, Publik	4	3	12	Melakukan sosialisasi seleksi lebih luas, Meninjau ulang kriteria seleksi jika perlu
		Proses seleksi tidak berjalan transparan atau akuntabel			Kurangnya dokumentasi, tidak adanya tim independen	Internal	C	Menurunkan kepercayaan publik, potensi keberatan hukum	Pelamar, Masyarakat, Pemkab	4	3	12	Melibatkan pihak independen (akademisi/media), mempublikasikan hasil seleksi
		Konflik kepentingan dalam proses penilaian atau rekomendasi			Anggota tim seleksi memiliki hubungan pribadi/afiliasi dengan pelamar tertentu	Internal	C	Merusak kredibilitas seleksi, keputusan bisa dipertanyakan	Dinas Kominfo, Pemkab, Pelamar	5	2	10	Membentuk panitia seleksi yang objektif, Menerapkan pakta integritas
		Pelamar terpilih tidak mampu menjalankan tugas secara profesional			Kurangnya uji kompetensi menyeluruh, verifikasi rekam jejak lemah	Internal	C	Kinerja Radio Suara Kudus menurun, menimbulkan opini negatif masyarakat	Masyarakat, Lembaga Penyiaran	4	3	12	Lakukan uji kelayakan & kepatutan yang komprehensif
Publikasi Berita	Kegiatan Publikasi Berita terlaksana sesuai ketentuan	Biaya publikasi lebih tinggi dari anggaran atau tidak efisien			Salah estimasi harga pasar, tidak selektif memilih media, mark-up biaya	Internal	C	Pemborosan anggaran, temuan audit	Dinas Kominfo, Inspektorat, BPK	4	2	8	Melakukan valuasi berkala vendor/media, Membuat standar biaya
		Penyedia media tidak memiliki jangkauan pembaca/penonton yang sesuai sasaran			Tidak ada analisis segmentasi audiens media, penunjukan media tidak berdasarkan data	Internal	C	Informasi tidak efektif sampai ke publik sasaran	Masyarakat sasaran, OPD	3	4	12	Menggunakan data audiens/media rating, Melakukan survei minat masyarakat, Memilih media berbasis target
		Isi konten publikasi kurang menarik atau tidak sesuai format media			Konten terlalu formal, tidak menyesuaikan dengan platform media (TV, cetak, online)	Internal	C	Informasi tidak terbaca atau tidak tersampaikan secara maksimal	Masyarakat umum	3	4	12	Mengembangkan konten visual, video, atau narasi kreatif sesuai media, latih tim konten kreatif
												0	
Sub Kegiatan : Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/Juknis											0	
Penerbitan Majalah Gema Semarak	KegiatanMajalah Gema Semarak terlaksana sesuai ketentuan	Terlambat terbit dari jadwal yang ditetapkan			Keterlambatan penulisan, editing, atau percetakan	Internal	C	Distribusi informasi tidak tepat waktu, informasi menjadi tidak aktual	Pembaca, OPD	3	4	12	Membuat timeline ketat, Memantau progres per tahap
		Kurangnya kualitas isi (konten tidak informatif/kurang menarik)			Minim riset, kurangnya SDM penulis profesional, pengumpulan data tidak maksimal	Internal	C	Majalah tidak dibaca masyarakat, tidak jadi sumber informasi yang efektif	Masyarakat umum, OPD terkait	4	3	12	Mengevaluasi isi setiap edisi, Menggunakan narasumber terpercaya, Melibatkan tim kreatif
		Majalah tidak sampai ke pembaca sasaran (distribusi tidak merata)			Tidak ada daftar distribusi yang valid, tidak melibatkan kecamatan/instansi penerima	Internal	C	Informasi tidak tersebar optimal, kegiatan tidak dirasakan masyarakat	Masyarakat umum, OPD terkait	3	3	9	Menggunakan daftar distribusi terdokumentasi, Meminta bukti terima dari penerima
		Layout/design kurang menarik dan tidak sesuai selera target pembaca			Desain monoton, tidak sesuai karakter pembaca, miskomunikasi dengan tim konten	Internal	C	Menurunkan minat baca, menurunkan citra profesional majalah	Masyarakat umum	3	3	9	Melakukan uji desain (mock-up), Melakukan survei kecil pada target pembaca, Memberi pelatihan desain kepada tim

Operasional Radio Suara Kudus	Kegiatan Operasional Radio Suara Kudus terlaksana sesuai ketentuan	Gangguan teknis pada peralatan siaran (transmitter, mixer, software)			Peralatan tua/usang, pemeliharaan tidak rutin	Internal	C	Siaran terputus, informasi tidak tersampaikan	Pendengar, instansi pengisi acara	4	3	12	Menjadwalkan pemeliharaan rutin, Mengadakan penggantian alat usang, Menyiapkan teknisi siaga
		Kurangnya konten yang menarik dan sesuai kebutuhan masyarakat			Kurang riset audiens, minim inovasi, topik tidak relevan	Internal	C	Pendengar menurun, tidak berdampak pada diseminasi informasi Pemkab	Masyarakat umum, stakeholder internal	4	3	12	Membuat survei kepuasan pendengar, Melibatkan komunitas, Mengevaluasi berkala konten
		Terjadi miskomunikasi antara narasumber dan penyiar			Tidak ada briefing, tidak ada naskah atau rundown yang jelas	Internal	C	Informasi menjadi simpang siur, merusak citra profesional Radio Suara Kudus	Narasumber, pendengar, Pemda	3	3	9	Melaksanakan SOP briefing sebelum siaran, Mengirim naskah ke narasumber sebelumnya, Melatih komunikasi penyiar
		Pelanggaran etika siaran (menyebut SARA, hoaks, bahasa tidak pantas)			Kurangnya pengawasan, tidak adanya standar editorial, penyiar tidak dilatih etika	Internal	C	Citra Pemkab buruk, potensi sanksi dari KPID	Masyarakat, Pemkab, Lembaga pengawas media	5	2	10	Menyusun Pedoman Etik Siaran, Mengadakan pelatihan reguler, Memonitoring siaran oleh editor
		Tidak tersampainya informasi program/kebijakan pemerintah daerah			Program/jadwal siaran tidak tepat, konten tidak relevan atau terlalu teknis	Internal	C	Program Pemkab tidak diketahui masyarakat, menurunkan transparansi informasi publik	Masyarakat, Pemkab	4	3	12	Menyesuaikan waktu siaran, Menyederhanakan isi, Membuat program tematik seputar kebijakan publik
		Rendahnya daya jangkau siaran ke wilayah luar kota			Daya pemancar rendah, kondisi geografis	Eksternal	UC	Informasi tidak sampai ke seluruh masyarakat Kudus	Penduduk luar wilayah jangkauan siaran	3	4	12	Meningkatkan kualitas pemancar, Menyediakan siaran live streaming via internet
		Keterbatasan SDM penyiar dan teknisi radio			Jumlah SDM sedikit, jam kerja padat, tidak ada regenerasi penyiar	Internal	C	Gangguan jadwal siaran, kualitas program menurun	Interna Radio, Pemkab	3	3	9	Merekrut SDM magang/kontrak, Melaksanakan pelatihan rutin, Membuat jadwal rotasi yang manusiawi
PROGRAM : PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA													
Kegiatan : Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota													
Sub Kegiatan : Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE													
Penilaian indeks SPBE	Menyusun bukti dukung penilaian indeks SPBE	Rendahnya interoperabilitas sistem antar instansi			Sistem aplikasi tidak terintegrasi, menimbulkan duplikasi data	Internal	C	Layanan digital tidak efisien dan lamba	Masyarakat pengguna layanan publik dan ASN pengguna layanan administrasi pemerintahan	3	2	6	Percepatan penerapan arsitektur SPBE dan integrasi layanan prioritas
		Perubahan kebijakan pusat terkait indikator penilaian SPBE			Regulasi dari pemerintah pusat	Eksternal	C	Pemda perlu waktu untuk menyesuaikan dengan regulasi yang baru	Tim Koordinasi SPBE, pemerintah daerah	2	2	4	Pemantauan aktif kebijakan pusat dan penyesuaian dokumen SPBE

Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota												
Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Gangguan koneksi jaringan			Kegagalan perangkat jaringan atau gangguan listrik	Internal	C	Terganggunya komunikasi dan pertukaran data antar instansi	OPD/instansi pengguna jaringan intra pemerintah daerah	4	2	8	Meningkatkan pemeliharaan dan pengawasan perangkat jaringan serta menyediakan backup daya
Sub Kegiatan : Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo												
Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Pelaksanaan audit infrastruktur dan audit aplikasi	Temuan hasil audit tidak ditindaklanjuti			Kurangnya komitmen dan tindak lanjut dari OPD terkait	Internal	C	Risiko keamanan atau efisiensi sistem tidak diperbaiki	OPD terkait dan Dinas Kominfo	4	2	8	Menyusun mekanisme tindak lanjut hasil audit dan monitoring secara berkala
Sub Kegiatan : Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE												
	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus	Aplikasi tidak sesuai dengan arsitektur SPBE			Kurangnya koordinasi dengan tim koordinasi SPBE	Internal	C	Aplikasi tidak sesuai arah pengembangan SPBE	tim koordinasi SPBE, pengguna aplikasi	3	2	6	Revisi arsitektur SPBE
		Ketergantungan pada pihak ketiga untuk pengembangan			Pembangunan/pengembangan aplikasi diserahkan penuh ke penyedia tanpa adanya transfer knowledge	Eksternal	C	Pemda tidak memiliki kontrol penuh terhadap aplikasi	Dinas Kominfo	3	2	6	Transfer source code program beserta knowledge wajib dalam kontrak pengembangan
		Kurangnya dokumentasi teknis aplikasi			Dokumentasi menjadi bagian dari persyaratan pengajuan subdomain	Internal	C	Kesulitan pemeliharaan dan pengembangan lanjutan	Dinas Kominfo	2	2	4	Mewajibkan pengumpulan dokumentasi teknis pada saat pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi khusus
Sub Kegiatan : Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali												
Operasional pusat kendali pemerintah daerah	Pemeliharaan pusat kendali pemerintah daerah	Gangguan jaringan atau sistem TIK			Ketergantungan pada penyedia jaringan internet	Eksternal	C	Layanan pusat kendali berhenti sementara	OPD, pengguna layanan pusat kendali	3	2	6	Upgrade infrastruktur dan menyediakan koneksi cadangan
Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah												
Operasional SPLP	Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Kurangnya pemantauan dan evaluasi kinerja integrasi pada sistem SPLP			Belum tersedia indikator kinerja dan mekanisme evaluasi	Eksternal	C	Integrasi tidak terarah dan tidak berkelanjutan	Pemerintah pusat, pemerintah daerah pengguna SPLP	2	3	6	Penyusunan indikator kinerja dan pelaporan SPLP secara berkala

[illegible]

Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah	Pelaksanaan pelatihan terkait keamanan informasi	Rendahnya kesadaran keamanan informasi pada pegawai			Minimnya edukasi dan sosialisasi kebijakan keamanan informasi	Internal	C	Potensi kebocoran data atau insiden siber akibat kelalaian pengguna	ASN pengguna sistem elektronik	3	4	12	Melakukan sosialisasi dan pelatihan keamanan informasi secara berkala
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian												
Operasional Pelaksanaan Keamanan Informasi	Monitoring keamanan informasi	Serangan siber seperti malware, ransomware, dan phishing			Kurangnya antivirus, pelatihan keamanan informasi, dan pemantauan aktivitas jaringan	Internal	C	Sistem tidak berjalan, data terenkripsi atau dicuri, operasional terganggu	Dinas Kominfo, pengguna sistem elektronik	3	4	12	Penguatan sistem keamanan dan edukasi terkait keamanan informasi kepada seluruh ASN

BAB V

PENUTUP

Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2026 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai tersebut :

a. Catatan Penting.

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2026 antara lain :

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Dinas Komunikasi dan Informatika pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Kudus .
2. Penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika ini berpedoman pada Renstra Komunikasi dan Informatika Tahun 2026-2029, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2026 telah termuat dalam Renja.

b. Kaidah Pelaksanaan.

1. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika ini akan menjadi pedoman dalam rangka penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2026;
2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Kudus. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil pembahasan Bersama DPRD Kabupaten Kudus.
3. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2026.

Kudus, 31 Juli 2025
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA,

DWI YUSI SASEPTI, S.Sos, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19740919 199303 2 002

